

LIFESTYLE

Pernikahan Jokowi hingga Kelahiran Gibran Janggal, Peneliti Dokumen Jabarkan Jarak Waktu yang Aneh

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.04 WIB



Dr. M. Fadjiroel Rachman @fadjiroel · Aug 12, 2017
Selamat ulang tahun pernikahan ke-30 Presiden @jokowi & Ibu Negara Iriana. Semoga bahagia selamanya ~ FR



Kolase dan Tangkapan Layar 30 Tahun Pernikahan Jokowi dan Iriana. FOTO/Kolase.

BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) palsu dengan tingkat keyakinan 99,98 persen.

Ia mendasarkan penilaian itu pada dua hal, yaitu karena tak pernah ditunjukkan ke publik dan kronologi janggal dalam video kampanye "Cerita Hidup Jokowi".

Pernyataan ini disampaikan Luke Susilo dalam obrolan bersama Refly Harun yang tayang di channel YouTube REFLY HARUN PODCAST pada 27 Oktober 2026.

"Apakah Anda yakin ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Kalau yakin asli berapa persen keyakinannya? Kalau yakin palsu berapa

persen keyakinannya?" tanya Refly.

Luke menjawab, "Kalau soal ijazahnya sejauh ini saya yakin 100% palsu. Ya udah 99, 98 aja," ujarnya.

"UGM mengatakan asli, Labfor mengatakan asli, teman-teman mengatakan asli, tapi barang yang asli itu yang mana? Kan enggak pernah ditunjukkan," tambahnya.

kemudian menjabat sebagai Jubir Presiden 2019-2021 kemudian sekarang menjadi Dubes RI utk Kazakhstan merangkap Tajikistan



@fadjiroel has blocked you
You can view public posts from @fadjiroel, but you are blocked with them. You also cannot follow or message @fadjiroel.

Dr. M. Fadjiroel Rachman @fadjiroel · 1h
Selamat Prof. & Pridaus Ali, M.Sc., Ph.D! Pridaus Ali adalah Guru Besar di Fakultas Teknik (Jur. Informatika) UGM yang pernah berprestasi untuk masyarakat Indonesia di bidang teknik dan teknologi. Semoga sukses selalu!

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	17
Aneka Berita	20

OPINI

Bank Aceh Selangkah Lagi Menuju Bank Devisa



Oleh: Khalil Ismail ((Direktur Kepatuhan Bank Aceh Periode 2006 - 2010))

UDAH merupakan kodrat atau menjadi hukum alam, bahwa

dalam kehidupan di dunia ini, segala sesuatu selalu dimulai dari yang kecil, dalam perjalanan waktu tumbuh menjadi besar.

Selengkapnya di halaman 20 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selengkapnya di halaman 20 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Guntur Romli Pertanyakan Agama dan Kewarasan Gibran, Sebut Jadi Beban Prabowo



BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mempertanyakan sikap Gibran yang dinilai tidak merespons seruan moral dan etik terkait polemik pencalonannya sebagai wakil presiden.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Sekjend Badan Narkotika China Temui Kapolri, Bahas Jaringan Sabu 1,2 Ton



JAKARTA — Pengungkapan laboratorium gelap narkoba di Kabupaten Pidie, Aceh, yang menyita sekitar 1,2 ton sabu kini memasuki babak lanjutan. Kepolisian tidak hanya membidik para pelaku yang terlibat dalam produksi, tetapi juga memburu pihak yang diduga menyediakan modal serta mengendalikan jaringan di balik operasi tersebut.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Bank Aceh

Action

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianannya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

NASIONAL

Guntur Romli Pertanyakan Agama dan Kewarasan Gibran, Sebut Jadi Beban Prabowo

Oleh Redaksi · 28 Okt, 20.44 WIB



BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mempertanyakan sikap Gibran yang dinilai tidak merespons seruan moral dan etik terkait polemik pencalonannya sebagai wakil presiden.

Guntur bahkan melontarkan pertanyaan tajam mengenai rasa malu, agama, dan kewarasan Gibran. Menurut dia, seseorang yang masih memiliki kesadaran moral semestinya merespons kritik, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut konstitusi dan etika dalam kehidupan bernegara.

"Kami juga sebenarnya masih husnuzan. Husnuzan bahwa Gibran ini masih manusia yang

beragama dan masih waras," kata Guntur di Channel YouTube Sinkos Indonesia, Rabu (28/10/2026).

Ia kemudian mengaitkan kritik tersebut dengan ajaran agama mengenai pentingnya rasa malu sebagai bagian dari iman.

"Kalau beragama itu kan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman," ujarnya.

Guntur menilai sikap diam terhadap kritik moral yang disampaikan berbagai kalangan menimbulkan pertanyaan mengenai kesediaan Gibran untuk melakukan evaluasi diri.

Menurut dia, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan etika pejabat publik. Jabatan wakil presiden, kata dia, semestinya disertai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi

Politik dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Guntur juga menyoroti seruan moral dari kalangan akademisi. Ia menyebut sekitar 150 guru besar telah menyuarakan kritik terhadap persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Dalam pandangannya, kritik dari kalangan akademisi semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pejabat negara, bukan diabaikan tanpa penjelasan yang memadai.

"Ketika orang sudah kelihatan di pucuk, dia telanjang, diteriakin oleh 150 guru besar, kamu melanggar konstitusi, kamu enggak punya etika, kamu harus mundur," ujar Guntur.

Selain menyoroti sikap Gibran, Guntur juga mempersoalkan keterangan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menge-

nai proses penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19, khususnya Pasal 18 ayat (3).

Menurut Guntur, mantan Ketua KPU menyebut ketentuan tersebut merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan. Namun, ia mengklaim bahwa direktur jenderal dari kementerian terkait telah menyatakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pihaknya tidak mengajukan usulan tersebut.

Guntur menilai perbedaan keterangan itu perlu diperiksa secara serius karena menyangkut proses penyusunan aturan pemilu.

"Artinya dia sudah banyak sekali berbohong soal ini rekamendasi dari Kementerian, kemudian juga ini sudah diputuskan dalam RDP dan kita ...

NASIONAL

Sekjend Badan Narkotika China Temui Kapolri, Bahas Jaringan Sabu 1,2 Ton

Oleh Van · 28 Okt, 20.48 WIB



JAKARTA — Pengungkapan laboratorium gelap narkoba di Kabupaten Pidie, Aceh, yang menyita sekitar 1,2 ton sabu kini memasuki babak lanjutan. Kepolisian tidak hanya membidik para pelaku yang terlibat dalam produksi, tetapi juga memburu pihak yang diduga menyediakan modal serta mengendalikan jaringan di balik operasi tersebut.

Langkah itu mengemuka setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pengendali Narkotika China (National Narcotics Control Commission/NNCC), Lan Weihong, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama lintas negara untuk membongkar jaringan narkoba yang beroperasi hingga ke Indonesia.

Dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, Suyudi menegaskan bahwa kolaborasi dengan otoritas China akan terus diperluas. Pengungkapan laboratorium di Aceh dinilai bukan akhir dari operasi, melainkan pintu masuk untuk mengejar pihak-pihak lain yang diduga masih berada di balik jaringan tersebut.

Kapolri memastikan penyidik masih mendalami perkara itu, terutama untuk mengidentifikasi pendana dan pihak yang mendukung operasional laboratorium. Aparat juga menelusuri kemungkinan keterkaitan kasus tersebut dengan jaringan narkoba lain yang telah terungkap di kawasan Sumatera.

"Kerja sama dengan China akan berlanjut karena masih ada target-target lain," demikian penegasan

Suyudi sebagaimana diberitakan detikNews pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pelaku di lapangan belum cukup untuk memutus rantai kejahatan narkoba. Penyelidikan kini diarahkan pada struktur jaringan yang lebih luas, termasuk aliran dana, jalur pengiriman bahan baku, serta pihak-pihak yang diduga mengatur proses produksi dan distribusi.

Jaringan Lintas Negara Mulai Terkuak

Wakil Sekretaris Jenderal NNCC China, Lan Weihong, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap jaringan penyelundupan narkoba cair tersebut telah berlangsung sejak 2025. Informasi awal yang diperoleh otoritas China berkaitan dengan kelompok kejahatan yang diduga mengirimkan narkoba cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos ke Indonesia.

Dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, Lan menjelaskan bahwa penyelidikan intensif selama sekitar satu tahun membantu otoritasnya memetakan aktivitas kelompok tersebut. Pengiriman narkoba cair ke Indonesia disebut telah dilakukan berulang kali sebelum laboratorium di Aceh berhasil dibongkar.

Informasi intelijen itu kemudian disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) RI pada September 2026. Setelah koordinasi dilakukan, otoritas Indonesia, China, dan Malaysia memperkuat kerja sama untuk menindak jaringan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

MAKI Sebut Nusron Wahid Dipanggil KPK Besok: Kalau Mangkir Lagi Harus Dijemput Paksa

Oleh Redaksi · 27 Okt, 20.23 WIB

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (28/10/2026) besok.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK bertindak tegas jika Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Informasi pemanggilan tersebut disampaikan Boyamin berdasar-

kan keterangan dari dua sumber yang dinilainya tepercaya. Dia menyebut Nusron telah menerima surat panggilan kedua untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK.

"Berdasarkan informasi yang saya terima dari dua pihak yang kepercayaannya saya anggap tinggi, diperoleh informasi bahwa Nusron Wahid telah dikirim surat panggilan untuk hadir besok, tanggal 28 Oktober 2026, hari Rabu besok," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Menurut Boyamin, pemanggilan kali ini merupakan panggilan kedua. Dia menjelaskan, dua jadwal pemeriksaan sebelumnya yang tidak dihadiri Nusron masih mengacu pada surat panggilan pertama.

Pada pemanggilan awal, Nusron disebut tidak hadir karena memiliki agenda di kementerian yang dipimpinnya. Sementara itu, pada jadwal pemeriksaan ulang, dia diketahui berada di Johor Bahru, Malaysia.

Boyamin meminta KPK mengambil tindakan tegas apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Dia bahkan mendesak lembaga antirasuah tersebut melakukan penjemputan paksa jika ketidakhadiran kembali terjadi.

"Maka kalau tidak hadir, ya harus dijemput paksa. Kalau tidak jemput paksa, berarti KPK memang melanggar kode etik dan saya akan lebih mempercayakan pada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Masih Pertimbangkan Panggil Ulang Nusron Wahid, Boyamin: Jika Mangkir Jemput Paksa!

Oleh Redaksi · 27 Okt, 20.19 WIB

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Hal ini disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo merespons pernyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut bahwa KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron Wahid ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

417 Siswa Diduga Keracunan MBG di Bogor, Puskesmas Dibuat Sesak

Oleh Van · 28 Okt, 20.38 WIB



Bogor — Sebanyak 417 siswa keracunan MBG Bogor masih dalam penanganan tenaga kesehatan pada Selasa, 27 Oktober 2026. Para siswa berasal dari tiga SMP negeri di Kecamatan Dramaga dan diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade turun langsung memantau penanganan korban di Puskesmas Cangkurawok, Dramaga. Ia menyebut pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk menangani ratusan siswa tersebut. Wabup Bogor Ungkap Kondisi 417 Siswa Jaro Ade mengatakan dirinya menerima laporan dari Camat Dramaga pada Selasa pagi. Setelah berkoordinasi dengan Bupati

Bogor, ia mendatangi lokasi untuk memastikan para siswa mendapatkan penanganan. "Jumlah totalnya 417 dari SMP 1, SMP 2, dan SMP 3. Ada beberapa yang sudah kembali ke rumah, ada yang ke rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya bisa ditangani dengan baik," kata Jaro Ade. Korban berasal dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Dramaga. Sebagian siswa menjalani perawatan di puskesmas, sementara lainnya dirujuk ke rumah sakit. Sejumlah fasilitas kesehatan yang menangani korban antara lain Puskesmas Cangkurawok, Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi, dan RS Medika Dramaga. Siswa yang kondisinya dinyatakan membaik oleh tenaga medis diperbolehkan pulang.

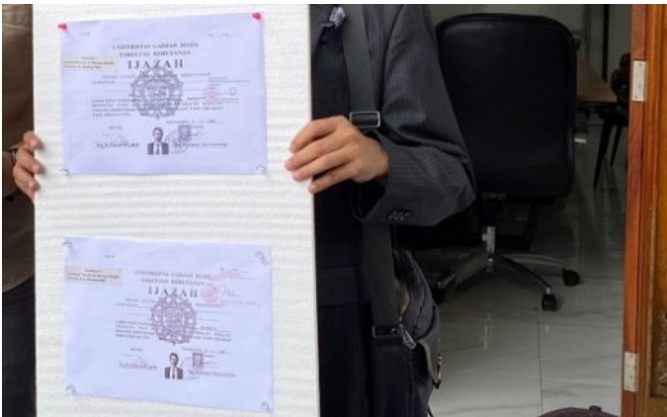
Penyebab Keracunan MBG Masih Diselidiki Dugaan keracunan muncul setelah para siswa mengonsumsi menu MBG pada Senin, 26 Oktober 2026. Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan. Jaro Ade menegaskan pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui sumber masalah. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan apakah penyebabnya berasal dari makanan, bumbu, atau faktor lain. "Untuk indikasi keracunan, tentu ini masih harus kita pastikan. Kita sedang melakukan uji laboratorium dan menunggu hasilnya, apakah indikasinya dari makanan, bumbu, atau dari apa," jelasnya. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, pemerintah daerah ber-

sama petugas kesehatan dan kepolisian melakukan pemantauan terhadap para siswa. Posko kesehatan juga dibuka di sekolah terdampak untuk menerima laporan tambahan. Pemerintah Antisipasi Korban Belum Terdata Pemkab Bogor turut mengantisipasi kemungkinan adanya siswa yang mengalami gejala tetapi belum mendapatkan penanganan medis. Petugas melalui Bhabinkamtibmas dan kepala desa diminta mengecek kondisi siswa di rumah masing-masing. Langkah tersebut dilakukan agar siswa yang sakit tetap terpantau, terutama jika orang tua mereka sedang bekerja dan belum mengetahui kondisi ...

NASIONAL

Soal Data Jokowi, Peneliti Dokumen: Kok Selalu Ada Dua?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.09 WIB



BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo mempertanyakan perbedaan informasi mengenai pernikahan Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana. "Kok selalu ada dua," kata Luke, merujuk pada dugaan adanya dua versi informasi dalam sejumlah dokumen terkait Jokowi. Ia menyoroti dua ucapan selamat ulang tahun pernikahan pada 2017 yang mencantumkan usia pernikahan berbeda, serta sebuah foto bertuliskan tanggal "FEB 86" yang menurutnya lebih tepat disebut foto pertunangan atau lamaran. Hal itu disampaikan Luke saat berbincang dengan Refly Harun dalam podcast di kanal YouTube REFLY HARUN PODCAST yang tayang pada 27 Oktober 2026. Luke mengatakan, dua ucapan tersebut diunggah Fajrul Rachman, yang disebutnya sebagai orang dekat Jokowi dan kini menjabat duta besar. Ucapan pertama diunggah pada 30 Agustus 2017, sedangkan ucapan kedua pada 24 Desember 2017. Menurut Luke, unggahan Agustus masih dapat dilihat hingga kini, sementara unggahan Desember telah dihapus. Ia menduga penghapusan itu berkaitan dengan foto yang menyertai unggahan tersebut. Luke menyoroti tulisan "FEB 86" di sudut foto yang disebut sebagai foto pernikahan Jokowi dan Iriana. Berdasarkan penafsirannya, foto itu justru menunjukkan momen pertunangan atau lamaran.

"Foto ini bukan foto pernikahan, tapi foto pertunangan atau foto lamaran," ujar Luke. Perbedaan lainnya terletak pada usia pernikahan yang dicantumkan dalam kedua ucapan tersebut. Luke mengatakan, unggahan 30 Agustus 2017 menyebut usia pernikahan Jokowi dan Iriana 30 tahun. Sementara itu, unggahan 24 Desember 2017 menyebut usia pernikahan mereka 31 tahun. Ia menilai perbedaan itu perlu dicermati karena informasi tersebut disampaikan oleh pihak yang menurutnya memiliki latar belakang pendidikan, bukan sekadar buzzer atau akun anonim. Luke juga membandingkan tanggal pada unggahan kedua Fajrul dengan tanggal pernikahan yang tercantum dalam fotokopi buku nikah yang diunggah PDIP. Dalam paparannya, ia menyebut 24 Desember 1986 sebagai tanggal pernikahan Jokowi dan Iriana yang tercantum pada dokumen tersebut. Meski demikian, Luke mengaku belum pernah melihat foto ijab kabul Jokowi dan Iriana yang beredar luas. Menurutnya, foto yang banyak beredar justru merupakan foto pertunangan. Ia mengakui informasi yang ditelusurinya berasal dari media sosial dan dirinya bukan orang dekat keluarga Jokowi. Karena itu, ia tidak menutup kemungkinan foto pernikahan tersebut dimiliki oleh orang-orang di lingkaran keluarga.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Luhut Binsar Pandjaitan: Tak Benar RI-Singapura Berkelahi Gara-gara Pemangkasan Ekspor Gas

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.54 WIB

BANDA ACEH -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah Indonesia tengah berkonflik dengan Singapura menyusul kebijakan pemangkasan ekspor gas alam ke negara tetangga tersebut. Luhut mengaku telah berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan ekspor gas tidak seharusnya membuat hubungan bilateral kedua negara memanas. "Nggak juga (tidak menimbulkan konflik), saya kira karena Pak Bahlil juga tadi saya bicara sama

beliau, ya beliau menyampaikan ini aja concernnya. Sebenarnya, kita ngapain berkelahi sama Singapura kan enggak ada juga," kata Luhut kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. Meski begitu, Indonesia, kata Luhut, harus tetap memiliki posisi yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan nasional. "Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas dan kita sendiri juga ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus," kata Luhut. Luhut juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait persoalan tersebut. Menurutnya, pandangan Pra-

bowo perlu didengar oleh negara-negara ASEAN mengingat posisi Indonesia di kawasan. "Saya kira Presiden sudah memberikan arahan yang jelas ya, dan Presiden sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN ini saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN," kata Luhut. Sebelumnya, Bahlil meminta pemerintah Singapura saling menghargai dalam menjalin hubungan bilateral. Ia menyindir sikap negara tetangga yang dinilai meminta penghormatan ketika membutuhkan, tetapi justru mengolok-olok Indonesia saat menghadapi kesulitan.

"Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Tetapi saya juga minta, jangan di saat bersamaan kalian minta menghargai; susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain, gimana itu?" kata Bahlil dalam konferensi pers terkait ketahanan energi nasional, Senin 26 Oktober 2026. Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 24 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Kuasa Hukum Pastikan Semua Ijazah Gibran bakal Ditunjukkan di PTUN: SD, SMA hingga S1

Oleh Redaksi · 27 Okt, 20.11 WIB

BANDA ACEH - Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi menyatakan siap membuktikan kelengkapan ijazah Gibran dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Kamis (29/10/2026) mendatang. Langkah ini menyusul keputusan majelis hakim yang menerima Gibran sebagai pihak tergugat intervensi dalam gugatan yang diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing. "Kami akan buktikan semuanya sekolah itu dengan ijazah-ijazah Mas Gibran. Semuanya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua

lengkap. Ada semuanya. Kalau penyeteraan itu suket, ini ijazah, ada ini ijazahnya," kata Rullyandi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Pasal Selundupan di Kasus Ijazah?' di iNews, Selasa (27/10/2026). "Semua lengkap dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, clear, saya nyatakan clear ya dan itu akan dibuktikan oleh PTUN," ujarnya. Sebagai informasi, Mercy Sihombing mengajukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmendiksus) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Wapres Gibran Punya Rahasia di Singapura? Penjemputan Tahun 2014 Lalu Kini Dipertanyakan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.12 WIB



BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo mempertanyakan cerita bahwa Gibran Rakabuming Raka dijemput dari sekolah di Singapura menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada 2014. Dalam obrolan bersama Refly Harun yang tayang di kanal YouTube REFLY HARUN PODCAST pada 27 Oktober 2026, Luke menilai cerita tersebut perlu diperjelas.

Ia membandingkannya dengan pernyataan Gibran pada masa awal kemunculannya di publik serta sejumlah hal lain yang menurutnya menimbulkan pertanyaan.

Luke mengaitkan persoalan itu dengan pernyataan Andi Widjanto yang, menurut penuturannya, disampaikan pada September 2026. Luke mengatakan pernya-

taan Andi sempat mendapat sambutan positif dari pendukung Jokowi karena mengaku pernah melihat ijazah asli.

Luke kemudian menirukan cerita tentang persiapan pelantikan Jokowi pada 2014 yang dikaitkannya dengan Andi.

"Saya diminta oleh Mbah Noto untuk memaksa Gibran ini dijemput pulang karena mau pelantikan," ujar Luke menirukan cerita tersebut.

Ia melanjutkan, "Karena katanya waktu itu Gibrannya ini ada di Singapura. Sehingga dijemputnya di sekolah di Singapura. Padahal 2014."

Luke juga mempertanyakan respons para pendukung Jokowi terhadap cerita tersebut. Menurut

dia, cerita itu diterima tanpa banyak keberatan.

Luke membandingkan cerita penjemputan tersebut dengan sikap Gibran ketika disebut tidak pernah ikut kampanye ayahnya. Ia menuturkan bahwa Gibran saat itu membantah dengan menyatakan dirinya sibuk bekerja.

"Padahal kan saya kerja, saya sibuk," kata Luke menirukan ucapan Gibran.

Luke turut menyinggung analisis seorang YouTuber yang disebutnya sebagai QNC. Menurut penuturan Luke, analisis tersebut menyebut Gibran bolak-balik Singapura dan Australia pada 2002 hingga 2010.

Dari situ, Luke mempertanyakan logat Jawa Gibran yang menurutnya masih kental pada 2014.

"Kok tahun 2014 logatnya sekental itu logat Jawanya," ujar Luke. Ia mengakui bahwa persoalan logat tersebut merupakan bagian dari analisisnya.

Selain cerita penjemputan, Luke menyinggung kemunculan Gibran di hadapan media pada 20 Oktober 2014. Menurut Luke, dalam kesempatan itu Jokowi menyebut usia Gibran 27 tahun, sedangkan Gibran menyebut dirinya berusia 25 tahun.

Luke menilai perbedaan angka tersebut sebagai petunjuk mengenai tahun kelahiran Gibran. Namun, penilaian itu merupakan kesimpulan Luke berdasarkan keterangan yang ia sampaikan dalam diskusi.

NASIONAL

Roy Suryo Beberkan Kebohongan Saksi Maret Samuel Sueken di Sidang Ijazah Jokowi, Apa Saja?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.19 WIB



BANDA ACEH - Roy Suryo menuding saksi Maret Samuel Sueken menyampaikan sejumlah keterangan bohong dalam persidangan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan itu disampaikan Roy setelah sidang dengan agenda pemeriksaan dua saksi, yakni Maret dan Lechumanan, rampung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (28/10/2026).

Roy mengaku lebih menghormati kesaksian Lechumanan dibandingkan Maret. Dia menilai sikap Lechumanan selama persidangan lebih sopan.

"Lechumanan jauh lebih polite jauh lebih sopan, jauh lebih jujur ya dibandingkan dengan Maret Samuel Sueken yang tadi teman-teman sudah bisa lihat semuanya perilakunya, menuding-nuding teman-teman semua, ya," kata Roy usai persidangan di PN Jaktim, Rabu (28/10/2026).

Roy kemudian membeberkan sejumlah hal yang menurutnya menunjukkan adanya kebohongan dalam keterangan Maret. Salah satunya terkait tautan video yang digunakan sebagai bukti saat Maret melaporkan Roy ke polisi.

Menurut Roy, video tersebut bukan berasal dari sumber asli, melainkan tautan TikTok milik pihak lain yang telah diberi tambahan keterangan. Dia juga mempersoalkan durasi video yang hanya 7 menit 33 detik, sementara acara

yang menjadi sumber video berlangsung lebih dari empat jam.

"Kebohongan pertama kan saya katakan, saya dan dia kan mengajukan beberapa link ya, saya tanya, apakah link itu Anda sendiri yang download? Ya. Kemudian tanya, apakah Anda nonton full?" Salah satu acara yang biasanya durasinya itu adalah 4 jam lebih bahkan kadang-kadang bisa lebih ya," kata Roy Suryo.

"Nah, itu dia hanya download sepanjang 7 menit 33 detik. 7 menit 33 detik digunakan untuk memastikan tindakan saya di situ dan apalagi yang dia download itu adalah URL sampah, link sampah. Itu dari TikTok orang lain, itu sudah ada tambahan caption, bukan asli dari TV yang bersangkutan," ucapnya lagi.

Roy juga mempersoalkan keterangan Maret mengenai pernyataan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait ijazah Jokowi. Roy menyebut Maret sempat mengidentifikasi pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut sebagai rektor UGM, tetapi kemudian mencabut pernyataannya.

"Yang kedua, dia juga kemudian saya temukan kebohongannya ketika dia mengatakan itu adalah Rektor UGM. Untungnya dia mencabut statement itu. Saya paksa dia, kalau nggak ada bohong 7 tahun ada, karena itu bukan rektor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Connie: Gegara Rocky Gerung, Akademisi Mengkritik Pemerintah Dianggap cari Jabatan

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.19 WIB

BANDA ACEH - Sebanyak 150 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah mengirimkan surat terbuka yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat bertajuk "Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional" tersebut diterbitkan pada Senin, 19 Oktober 2026.

Pengamat militer dan akademisi Prof. Connie Rahakundini Bakrie, yang menjadi salah satu inisiator, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontribusi intelektual dan tanggung jawab moral akademisi.

Menurutnya, ilmu pengetahuan harus menjadi landasan penting

dalam pengambilan keputusan, dan substansi dari kritik akademisi harus didengar oleh para pemangku kebijakan.

"Kebijakan itu kalau di negara maju, basisnya ilmu pengetahuan. Nah, tapi jangan hanya gara-gara Rocky Gerung, akademisi mengkritik bertujuan untuk cari jabatan," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam sinar Forum Keadilan, dikutip Selasa (27/10).

Ia menepis anggapan miring terhadap gerakan para akademisi tersebut yang hanya ingin melakukan seruan moral dan intelektual tak direndahkan mencari jabatan.

Surat terbuka ini ditujukan langsung kepada Gibran, dengan tembusan kepada Presiden Prabowo Subianto serta mantan Presiden ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

www.bankacehsyariah.co.id

NASIONAL

Aksi Emak-Emak di DPR Ajak Pengendara Bunyikan Klakson, Simbol Dukungan Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.23 WIB



BANDA ACEH - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) mengajak pengendara membunyikan klakson sebagai simbol dukungan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya. Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPR RI, sekaligus untuk menggalang tanda tangan petisi pemakzulan Gibran, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta aksi membentangkan spanduk putih bertuliskan, 'Bunyikan Klakson Kalau Setuju Gibran Turun!!!'.

Selain itu, spanduk berukuran besar terpasang di pagar Gedung DPR RI dengan tulisan 'Berikan Tanda Tangan Dukungan Anda Makzulkan Gibran'.

Koordinator Lapangan KNPRI, Merry Samely, mengatakan ajakan membunyikan klakson tersebut merupakan eksperimen sosial untuk melihat respons pengguna jalan terhadap tuntutan mereka.

"Kami melakukan sosial eksperimen, yaitu dengan minta kepada (pengendara) yang lewat membunyikan klakson apabila mereka setuju Gibran turun," kata Merry saat ditemui di halaman gerbang DPR RI, Rabu (28/10/2026).

Merry mengatakan aksi tersebut juga dibarengi dengan pembukaan posko penggalangan tanda tangan petisi. Petisi itu ditujukan kepada para wakil rakyat di Senayan agar DPR RI menindaklanjuti aspirasi mereka.

Menurut Merry, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober, Gibran

semestinya berinisiatif mengundurkan diri. Karena hal itu tidak terjadi, KNPRI mendesak DPR mengambil langkah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

"Kami merasa bahwa gedung DPR tidak boleh kosong. Begitu tanggal 6 kemarin sudah putusan MK, harusnya Gibran itu tinggal mundur. Tapi karena dia tidak mau mundur, terpaksa kita melakukan aksi seperti ini supaya dia diturunkan oleh DPR," tegasnya.

Merry mengaku memahami DPR RI tengah menjalani masa reses sehingga belum merespons tuntutan mereka. Namun, KNPRI mengaku telah menjadwalkan audiensi dengan pimpinan dewan setelah masa reses berakhir pada 8 Oktober.

Dia mengatakan surat permohonan audiensi telah disampaikan

sekitar dua pekan sebelumnya. Permohonan tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan.

Merry mengklaim pihaknya telah mendapat janji untuk diterima dalam audiensi setelah masa reses berakhir.

Terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan, Merry menilai DPR tidak perlu menggunakan mekanisme tersebut. Dia berpandangan DPR dapat langsung menyikapi putusan MK yang menurutnya telah bersifat final dan mengikat.

NASIONAL

Pemakzulan Gibran: Rakyat Menuntut Presiden Prabowo Pimpin Radical Break

Oleh Redaksi · 28 Okt, 14.25 WIB



BANDA ACEH - Demo pemakzulan Gibran (IST)Tuntutan pemakzulan Gibran terus bergulir bak bola salju. Sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan Gibran memang tidak qualified, tidak memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden RI. Jika di dunia nyata Gibran sedang jadi Wapres RI, jabatan ini sebenarnya lahir dari kejahatan Politik terstruktur, sistemik, terencana (TST), dan amoral, serta masuk kategori politik penghalalan cara guna mencapai tujuan. Maka, sangat pantas jika Gibran harus segera dipecat!

Modus politik kotor sarat moral hazard ini dapat berlangsung mulus karena saat "pencapresan", ayah Gibran, Jokowi, masih menjadi Presiden RI. Saat pencalonan, bisa saja hal ini lepas dari pengetahuan Prabowo. Selain itu, Jokowi juga didukung kekuatan besar yang tergabung dalam Gank Solo, oligarki dan paroc (SOP). Bahkan saat ini pun "pengaruh" SOP dalam pemerintahan Prabowo masih cukup terasa, meski paroc trennya menurun.

Belakangan, setelah terbitnya Putusan MK No.01/PHPU.PRES-XXIV/2026, berbagai modus politik kotor Jokowi/SOP terbongkar. Gibran yang tidak cukup umur, ternyata juga tidak lolos syarat pendidikan. Agar lolos, politik amoral Gank Solo dan oligarki pendukung telah dengan sengaja mengakali, merekayasa dan melanggar hukum. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip moral/etika, konstitusi dan perundang-undangan (MKP).

Pelanggaran prinsip-prinsip MKP berbangsa dan bernegara berlangsung mulus dan jauh dari pengetahuan publik, terutama karena Jokowi/Gank Solo mengendalikan semua sektor dan lembaga guna mengatasi dan menutupi berbagai kekurangan dan penghambat "pencawapresan" Gibran. Terungkapnya kejahatan MKP Gang Solo dan oligarki ini jelas merendahkan martabat dan mempermalukan bangsa: 290 juta orang Indonesia (data Agustus 2026) dipimpin pejabat tidak qualified secara moral, etika, hukum, intelektualitas, profesionalitas, dll.

Jika Gibran masih terus "dibiarkan" menjabat, maka Indonesia masuk kondisi darurat kepemimpinan. Apalagi jika mempertimbangkan sewaktu-waktu Presiden Prabowo dapat saja mengalami kondisi berhalangan tetap. Kondisi darurat ini tentu tak bisa dibiarkan. Maka, sangat kritis dan mendesak bagi aktor-aktor penting penentu kelangsungan hidup NKRI untuk bersikap, yakni parlemen (DPR/DPD/MPR), Pemerintah dan rakyat secara keseluruhan.

Aktor pertama adalah parlemen/DPR. Menurut Pasal 7A UUD NRI 1945, proses pemakzulan dimulai DPR menggunakan hak menyampaikan pendapat (HMP). Faktanya, Putusan MK No.01/2026 yang bersifat final dan binding, telah menyimpulkan Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA. Artinya Gibran tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wapres (delik #).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Hak Angket Suket Gibran Diprediksi Mulus Masuk DPR Jika Partai Ini Gabung!

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.13 WIB

BANDA ACEH - Peluang bergulirnya Hak Angket DPR terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergantung pada dukungan lintas fraksi. Analisis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menilai PDIP tidak bisa bergerak sendirian dan membutuhkan dukungan partai lain, termasuk PKS. Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (27/10/2026), Djayadi menjelaskan bahwa DPR dapat menindaklanjuti polemik tersebut melalui hak angket atau hak menyatakan pendapat. Namun, kedua mekanisme itu memiliki persyaratan yang berbeda.

Menurutnya, hak angket relatif lebih mudah diajukan karena membutuhkan sedikitnya 25 ang-

gota DPR dari lebih dari satu fraksi. Dengan demikian, dukungan dari fraksi lain menjadi syarat penting agar usulan tersebut dapat diproses.

"Hak angket lebih mudah, saya kira. Lebih sedikit ringan persyaratannya, yaitu 25 anggota mengusulkan dan lebih dari satu fraksi," kata Djayadi.

Ia menegaskan, PDIP tidak dapat mengajukan hak angket sendirian. Setelah usulan memenuhi persyaratan awal, proses di DPR juga harus memenuhi ketentuan kehadiran dan persetujuan anggota dewan.

"Nah, memang secara administratif, politik di DPR nggak bisa diproses ini hak hak angket, kalau hanya PDI sendirian. Karena kan syaratnya itu lebih dari satu fraksi, begitu," tegasnya.

Karena itu, Djayadi menilai keterlibatan PKS dapat mengubah peluang politik usulan tersebut. "Jadi kalau misalnya PKS betul-betul bergabung maka proses ini bisa dilanjutkan," lanjut dia.

Meski demikian, bergulirnya hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan Gibran. Djayadi mengingatkan bahwa prosesnya masih panjang dan hasil akhirnya belum dapat dipastikan, sehingga DPR perlu menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat yang pro dan kontra terhadap polemik tersebut.

"Bahwa nanti prosesnya berakhir di misalnya tidak dilanjutkan sampai ke proses ke MK lagi dan pemakzulan misalnya maka semua harus sepakat, kita akhiri," imbuhnya.

NASIONAL

Kesaktian Jokowi Diuji Jika Jadi Ketum PSI

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.41 WIB



BANDA ACEH -Kesaktian Politik Joko Widodo (Jokowi) bakal diuji jika benar-benar menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Posisi tersebut akan menjadi pembuktian apakah pengaruh politik Jokowi tetap kuat setelah tidak lagi menjabat Presiden RI dan bukan bagian dari PDI Perjuangan (PDIP).

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, dorongan internal PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua umum membuka arena pertarungan politik baru bagi ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pelaku Pembunuh Ibu & Anak di Madiun Bukan Orang Sembarangan, Polisi Sebut IQ-nya di Atas Rata-Rata

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.52 WIB

BANDA ACEH - Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Madiun berinisial DBM disebut memiliki tingkat intelegensi atau IQ di atas rata-rata. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan psikologis yang disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing, dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa (27/10/2026). "Jadi memang yang bersangkutan ini kan, saya sampaikan tadi, sudah diperiksa psikologis, memang dia

mempunyai kelebihan berupa IQ di atas rata-rata. Dia juga memiliki kepintaran yang tinggi," tuturnya.

Roy menjelaskan, tersangka membutuhkan waktu sekitar dua hari sejak dugaan pembunuhan dilakukan hingga menjalankan upaya untuk menyembunyikan dan menghilangkan jejak kedua korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban DH diduga tewas setelah dicekik tersangka di sebuah hotel di Kota Madiun.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Budayawan: Gibran Pangeran Bloon dan Tembok Ratapan Jokowi Sudah Ambruk

Oleh Redaksi · 28 Okt, 14.23 WIB



BANDA ACEH - Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kondisi Politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut Gibran sebagai “pangeran bloon” yang dinilainya belum matang dalam memahami permainan politik nasional. Dalam pernyataannya, Sobary menilai Gibran belum menunjukkan kemampuan membaca peta politik, memahami arah permainan para elite, maupun menangkap dinamika hubungan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. “Gibran pangeran bloon, mentahnya mentah, naifnya naif,” kata Mohamad Sobary di Podcast Obor Rakyat Reborn, Selasa (27/10/2026). Menurut Sobary, persoalan yang ia soroti bukan hanya soal kemam-

puan Gibran sebagai individu, melainkan juga pemahamannya terhadap situasi politik yang sedang berkembang. Ia mempertanyakan sejauh mana wakil presiden tersebut memahami langkah politik Jokowi, strategi Prabowo, serta arah hubungan kekuasaan di tingkat nasional. Sobary menggambarkan Gibran seolah tidak mengetahui permainan politik yang sedang berlangsung di sekelilingnya. “Dia tidak tahu kiri kanan. Dia tidak tahu konteks politik ini sekarang sebenarnya permainan apa. Bapaknya itu main seperti apa, mau ke arah mana, Presiden Prabowo bagaimana mainnya, dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu cara membaca peta politik,” ujarnya. Kritik tersebut menyasar persoalan yang lebih luas, yakni kapasi-



tas kepemimpinan Gibran di tengah perubahan peta kekuasaan setelah pergantian pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam politik nasional, kemampuan membaca situasi, memahami kepentingan berbagai kelompok, dan menentukan posisi strategis merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Karena itu, penilaian Sobary tersebut menjadi kritik keras terhadap kesiapan Gibran menjalankan peran sebagai wakil presiden. Tak berhenti pada Gibran, Sobary juga melontarkan kritik terhadap Jokowi. Ia mengungkapkan kekecewaan atas perjalanan politik mantan presiden tersebut dan menggunakan ungkapan Jawa untuk menggambarkan konsekuensi dari tindakan seseorang. “Kita malu dan kita pernah

merasa seperti dikencingi Jokowi,” kata Sobary. Ungkapan itu menunjukkan kerasnya kekecewaan yang ia sampaikan. Dalam pandangannya, perjalanan politik Jokowi harus dinilai berdasarkan tindakan dan keputusan yang telah diambil selama berkuasa, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan publik. Sobary kemudian mengutip ungkapan Jawa, “Jokowi metik woing pakarti,” yang dalam maksud pernyataannya menggambarkan seseorang yang memetik buah dari perilaku dan perbuatannya sendiri. Pesan yang hendak ditegaskan adalah bahwa kekuasaan tidak membuat seseorang terbebas dari konsekuensi atas keputusan politiknya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Karhutla Masih Membara, Aktivis Desak Presiden Copot Raja Juli

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.37 WIB

BANDA ACEH -Aktivis muda nasional Muhammad Fithrat Irfan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik serta kelalaian atas penanganan karhutla yang saya nilai belum mampu memberikan perlindungan memadai kepada masyarakat. Irfan juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pencegahan kebakaran, membuka perkembangan penegakan hukum, serta memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai kewajiban. Desakan tersebut disampaikan di tengah penurunan jumlah titik panas, meskipun kebakaran masih terjadi di sejumlah daerah. Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla sepanjang Januari

hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. “Saya mendesak Presiden mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik serta kelalaian atas penanganan karhutla yang saya nilai belum mampu memberikan perlindungan memadai,” kata Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Oktober 2026. Irfan menegaskan, desakan itu merupakan kritik terhadap kinerja pejabat publik. Ia menyatakan tidak sedang menuduh Raja Juli secara pribadi melakukan pembakaran atau menyebutnya terbukti melakukan tindak pidana. Menurutnya, evaluasi harus mencakup efektivitas pencegahan, kecepatan penanganan, kepatuhan

pengelola lahan, hingga pemulihan lingkungan. Titik Panas Turun, Karhutla Masih Terjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 12 kejadian bencana pada 26 Oktober 2026. Sebanyak 10 kejadian di antaranya merupakan karhutla yang tersebar di Grobogan, Luwu Timur, Ciamis, Bangka Tengah, Wonogiri, Sukoharjo, Sidenreng Rappang, Kota Batu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Malang. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 147 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 25 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB. Jumlah tersebut turun dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 317 titik. Namun, penurunan titik panas tidak serta-merta menunjukkan

kebakaran telah berakhir. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi satelit sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Tanjung Jabung Timur, Jambi, beberapa wilayah di Sumatera Selatan, serta Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada lahan gambut, bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan pembasahan dan penyisiran lanjutan. “Keberanian petugas yang memadamkan api tidak boleh menjadi penutup kelemahan pencegahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Lechumanan di Sidang Roy Suryo: Saya Tak Bisa Tidur, Jokowi Dijatuhkan Serendah-rendahnya

Oleh Redaksi · 28 Okt, 12.51 WIB



BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan dalam sidang kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (28/10/2026). Lechumanan dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan dengan terdakwa Roy Suryo. Dia mengaku tidak bisa tidur setelah ijazah Jokowi dituding palsu. Dia mengaku selama ini menjadi salah satu pihak yang membela Jokowi. “Kalau saya sendiri ya saya enggak bisa tidurlah. Karena Pak Jokowi kan dijatuhkan serendah-rendahnya. Ya saya kan orang yang sangat membela Pak Jokowi,” kata Lechumanan menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU).

Lechumanan juga mengungkapkan alasan dirinya meyakini ijazah Jokowi asli. Dia merujuk pada pernyataan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyebut Jokowi sebagai alumnus kampus tersebut. “Saya sebelumnya itu dikirimkan bahwa melalui link UGM itu tanggal 11 Oktober 2022, itu rektor menegaskan Pak Jokowi adalah alumnus UGM. Sehingga saya berpendapat bahwa enggak mungkin kalau sudah alumnus masa membuat ijazah palsu gitu. Jadi ketika saya melihat ada link di UGM bahwa Pak Jokowi merupakan alumnus dari UGM, ya saya

berpendapat bahwa ijazah itu asli,” ujar Lechumanan. Selain merujuk pada pernyataan UGM, Lechumanan mengaku pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. “Ya melihat ijazah aslinya itu waktu di Gelar Perkara Khusus 15 Desember 2025, di Polda Metro Jaya,” kata Lechumanan. Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu. Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Analisis tersebut, menurut jaksa, dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen. Hasil analisis itu disebut digunakan untuk mendukung tudingan ijazah S-1 Jokowi tidak asli. Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Luhut Tolak Ikut Campur Pemangkasan Ekspor Gas ke Singapura

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.46 WIB

BANDA ACEH -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan evaluasi kebijakan ekspor gas alam Indonesia ke Singapura kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Luhut menilai, Bahlil telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan melakukan evaluasi sebagaimana diperlukan. “Ya, kira-kira kita serahkan pada Menteri ESDM, kan Menteri ESDM tadi sudah memberikan pernyataan, kira-kira ya perlu die-

valuasi baik-baik dan saya kira Pak Bahlil sudah melakukan itu semua,” kata Luhut kepada wartawan, Selasa 27 Oktober 2026. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 24 Oktober 2026. Pemangkasan tersebut mencakup pasokan gas dari wilayah Natuna sebesar 15 MMSCFD dan Sumatra sebesar 16 MMSCFD.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ubedilah Bongkar Dugaan Koneksi Bisnis Keluarga Jokowi dan Sinarmas, Selisih Karhutla Rp7,9 T jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 12.55 WIB



BANDA ACEH – Analisis sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kembali mengungkap sejumlah kejanggalan yang menurutnya perlu ditelusuri dalam transaksi bisnis yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dengan AP, yang disebut sebagai anak seorang Managing Director di grup usaha yang diduga merujuk pada Sinarmas.

Sorotan Ubedilah tidak berhenti pada hubungan bisnis tersebut.

Ia turut mengaitkannya dengan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak usaha Sinarmas Group.

Perusahaan itu pernah menghadapi gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) dengan nilai tuntutan sekitar Rp7,9 triliun pada 2015.

Dalam podcast bersama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, yang dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (28/10/2026), Ubedilah memaparkan rangkaian peristiwa yang dinilainya menyisakan pertanyaan serius, mulai dari transaksi saham, pendanaan perusahaan, hingga perbedaan nilai tuntutan dan pembayaran dalam perkara karhutla.

Ubedilah mengaku telah melaporkan persoalan transaksi bisnis yang melibatkan kedua putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut kepada KPK pada 2022.

Ia mempertanyakan asal-usul pendanaan, besarnya investasi, serta hubungan bisnis antara kelu-

arga Jokowi dan keluarga petinggi korporasi.

Tuntutan Rp7,9 Triliun, Pembayaran Disebut Hanya Rp76 Miliar

Perkara karhutla PT BMH menjadi salah satu titik yang disoroti Ubedilah. Ia menyoroti perbedaan besar antara nilai gugatan yang mencapai sekitar Rp7,9 triliun dan jumlah pembayaran yang menurut penuturannya hanya Rp76 miliar.

"Ternyata ada kasus sebelumnya perusahaan ini pernah melakukan pembakaran hutan di Sumatera. Lalu diperkarakan tuh oleh Kementerian LH, lingkungan hidup."

"Sehingga kemudian perusahaan ini harus membayar denda sekitar Rp7,9 triliun kurang lebih. Karena kasus pembakaran hutan," jelas dia.

Ubedilah kemudian mengungkapkan bahwa proses hukum perkara tersebut tidak berakhir dengan pembayaran sebesar nilai tuntutan awal. Ia menyebut adanya proses banding yang menurutnya diikuti perubahan jumlah kewajiban perusahaan.

"Tapi kemudian dibawa ke pengadilan. Oh, itu awal putusannya tuh, tapi kemudian ada semacam banding ya kalau enggak salah. Setelah itu, tidak bayar Rp7,9 triliun, tapi yang dibayarkan hanya Rp76 miliar," tutur dia.

Perbedaan nominal itu menjadi pertanyaan yang diangkat Ubedilah. Namun, angka Rp7,9 triliun dan Rp76 miliar tersebut perlu dibaca sesuai tahapan proses hukum masing-masing.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Puji Presiden Brasil Lulusan SD, Said Didu Sentil Jimly: Membela Dinasti Jokowi Kok Semangat Banget

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.34 WIB

BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang memuji terpilihnya kembali Luiz Inácio Lula da Silva sebagai Presiden Brasil untuk masa jabatan keempat meski hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD). Menurut Said Didu, sebagai seorang ahli hukum, Jimly seharusnya memahami perbedaan aturan perundang-undangan di Indonesia dan Brasil terkait persyaratan pendidikan bagi calon presiden maupun calon wakil presiden.

"Pak @JimlyAs sebagai ahli hukum. Undang-Undang mereka mungkin memang mengizinkan, sementara UU kita mengharuskan

persyaratan ijazah," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (27/10).

Ia menilai pujian Jimly terhadap Lula mengandung pesan yang seolah membela dinasti Politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mengingat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang menjadi sorotan terkait polemik ijazah.

"Membela dinasti Jokowi kok semangat banget Pak. Biar lebih seru - mulai sekarang Bapak pimpin tim sukses Jan Ethes (cucu Jokowi) aja Pak," tegasnya.

Sebelumnya, Jimly memuji Lula karena kembali terpilih sebagai Presiden Brasil. Ia menyoroti latar belakang pendidikan Lula yang hanya menamatkan sekolah dasar dan mengikuti pendidikan kete-

rampilan, namun tetap mampu memenangkan pemilihan presiden pada Minggu (25/10/2026). Dalam kontestasi tersebut, Lula mengalahkan pesaingnya dari kubu sayap kanan, Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro.

"Hebat, Presiden Brasil Lula da Silva kmbali trpilih jadi Presiden ke4 kalinya. Pdh al cuma tamat SD & kursus ktrampilan," tulisnya di akun X pribadinya dikutip Senin (26/10).

Jimly kemudian mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan dalam Konstitusi Brasil yang mengatur syarat pencalonan peserta pemilu.

"Karena di Pasal 14 ayat (4) UUD Brazil, smua kandidat pemilu baik parlemen maupun pres/wapres hrs trdafter sebagai

pemilih & tidak buta huruf," lanjutnya.

Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat diketahui mendesak Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada awal Oktober 2026.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.

NASIONAL

Bersaksi di Sidang Roy Suryo, Lechumanan Ungkap Jokowi Terganggu Pemberitaan Ijazah Palsu

Oleh Redaksi · 28 Okt, 12.46 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan mengungkapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merasa terganggu dengan pemberitaan yang menuding ijazahnya palsu.

Hal itu diungkapkan Lechumanan saat bersaksi dalam sidang kasus fitnah terkait ijazah Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Dalam persidangan, Lechumanan mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi dan menanyakan keberadaan ijazahnya. Namun, dia tidak secara spesifik menanyakan apakah fotokopi ijazah yang beredar di YouTube sesuai dengan dokumen aslinya.

"Pernah ketika bertemu dengan Pak Jokowi, apakah Saudara pernah menanyakan tentang ijazah Pak Jokowi yang fotokopi yang ditayangkan di YouTube-YouTube, terutama oleh terdakwa ini," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Iya," jawab Lechumanan.

JPU kemudian mendalami pertanyaan yang diajukan Lechumanan kepada Jokowi, termasuk apakah dia pernah memastikan fotokopi ijazah yang beredar sesuai dengan dokumen aslinya.

"Apakah memang itu fotokopian dari aslinya atau berbeda? Kalau Saudara tidak pernah menanyakan," ucap JPU.

"Saya enggak nanya seperti itu," ucap Lechumanan.

"Yang Saudara tanya terkait apa?" tanya JPU.

"Yang saya tanya aja, 'Pak, ada kan ijazahnya, kan?' Itu aja," tutur Lechumanan.

JPU juga menanyakan perasaan Jokowi ketika menghadapi polemik tuduhan ijazah palsu tersebut. Menurut Lechumanan, Jokowi merasa terganggu dengan pemberitaan yang terus mempersoalkan keaslian ijazahnya.

"Ya artinya terganggu. Terganggu, ya, terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang terus membuat statement bahwa produk (ijazah) itu kan palsu. Jadi seolah-olah UGM mengeluarkan produk palsu," kata Lechumanan.

Dia mengatakan polemik tersebut juga berdampak pada dirinya. Lechumanan mengatakan sulit tidur karena menilai tuduhan terhadap ijazah Jokowi telah merendahkan sang mantan presiden.

"Kalau saya sendiri ya saya enggak bisa tidurlah. Karena Pak Jokowi kan dijatuhkan serendah-rendahnya. Ya saya kan orang yang sangat membela Pak Jokowi," kata Lechumanan.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Muslim Arbi: KDM Berkiblat ke Geng Solo, Prabowo Perlu Waspada Manuver Politiknya

Oleh Redaksi · 27 Okt, 17.17 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM perlu dicermati arah politiknya menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Di tengah popularitasnya sebagai kepala daerah, Muslim melihat kemungkinan Dedi membangun kekuatan Politik sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Muslim bahkan menilai KDM berpotensi berkiblat kepada kelompok politik yang diasosiasikan dengan Solo, terutama lingkaran politik Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muslim, dinamika tersebut perlu menjadi perhatian Gerindra dan Prabowo. Sebab, dukungan politik seseorang terhadap pemerintahan tidak otomatis menjamin kesetiaan jangka panjang ketika kepentingan dan kalkulasi menuju Pilpres 2029 mulai mengemuka.

"Prabowo perlu mewaspadai manuver politik KDM. kan dengan Solo, terutama lingkaran politik Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



www.harianaceh.co.id · Rabu, 28 Oktober 2026 · Halaman 8 dari 27

NASIONAL

Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

Oleh Redaksi · 28 Okt, 09.57 WIB



BANDA ACEH - Guru Besar IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Desakan itu menyusul sorotan terhadap potensi penerimaan negara sebesar Rp104,43 triliun dari denda administratif aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dwi Andreas menilai BPK perlu menjelaskan bagaimana potensi penerimaan dalam jumlah besar tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenhut tahun anggaran 2025.

"BPK harus objektif dalam menghitung, jangan sampai ini jadi permainan. BPK harus menjelaskan bagaimana persoalan ter-

sebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jadi perlu dievaluasi WTP-nya itu. Kalau perlu dicabut," kata Dwi Andreas kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026.

Estimasi Rp104,43 triliun tersebut merujuk pada perhitungan denda administratif atas aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 itu mencakup area seluas 67.125,41 hektare, yang berkaitan dengan 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 480 pemegang izin.

Menurut Dwi Andreas, apabila ditemukan salah saji material atau pengungkapan informasi yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajiban laporan keuangan, BPK perlu mengevaluasi kembali

opini audit sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan, opini WTP bukan jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan maupun kegiatan kementerian bebas dari persoalan.

"WTP itu bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian bebas dari persoalan. Karena itu, BPK perlu membuka dasar penilaiannya, termasuk menjelaskan status estimasi Rp104,43 triliun tersebut," ujarnya.

Pernyataan Dwi Andreas sejalan dengan sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan Razaq, yang sebelumnya mempertanyakan pemberian opini WTP kepada Kemenhut di tengah besarnya potensi penerimaan dari denda administratif pertambangan di kawasan hutan.

"Kami mendesak BPK menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jika ditemukan salah saji material atau pengungkapan yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajiban laporan, BPK perlu mengevaluasi kembali opini yang diberikan sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku," kata Hanan kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026.

Desak Pembenahan BPK
Dwi Andreas juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap BPK untuk memastikan integritas dan objektivitas pemeriksaan keuangan negara. Ia bahkan mengusulkan penggantian institusi tersebut apabila pembenahan dinilai tidak berjalan efektif.

NASIONAL

Mahfud MD: Kualitas Hukum dan Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran

Oleh Redaksi · 28 Okt, 09.04 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti penurunan kualitas penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ia menilai, sejumlah indikator menunjukkan kemunduran, meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah agenda besar, termasuk pemberantasan korupsi.

Mahfud mengakui, Prabowo telah mengambil sejumlah langkah yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

"Begini, sekarang ini dari apa yang kita katakan tadi, bahwa visi besarnya Pak Prabowo, oke, yang dulu tidak berani presiden sebelumnya atau tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, sekarang dilakukan, termasuk penangkapan koruptor-koruptor besar, gitu," kata Mahfud dalam tayangan YouTube pribadinya, Rabu (28/10).

Menurut Mahfud, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan antara kepemimpinan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia menilai, pengawasan secara terperinci terhadap jalannya pemerintahan masih perlu mendapat perhatian.

"Tetapi juga catatan tata kelolanya sebagai kepala negara dia oke, sebagai kepala pemerintahan dia tidak detail, tidak ngawasi," ujarnya.

Mahfud kemudian menyoroti sejumlah indeks internasional

yang mencatat penurunan posisi Indonesia. Ia menyebut, data tersebut menjadi indikator kuantitatif yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi perkembangan hukum dan tata kelola negara.

Salah satu indikator yang disorot Mahfud adalah indeks negara hukum yang diterbitkan World Justice Project (WJP). Ia menyebut, skor Indonesia pada 2026 turun dari 0,52 menjadi 0,51. Posisi Indonesia juga merosot dari peringkat ke-69 menjadi ke-75 dari total 140 negara.

Ia menambahkan, penurunan tersebut tidak hanya terlihat pada skor keseluruhan. Dari delapan indikator yang digunakan dalam penilaian indeks negara hukum, kata Mahfud, tujuh indikator menunjukkan kemunduran.

"Peringkatnya, dari peringkat negara kalau diurut yang terbaik 1, 2, 3, kita semula ada di peringkat 69, sekarang 75, turun menjadi 75 dari 140 negara," urainya.

Selain indeks negara hukum, Mahfud merujuk penilaian Varieties of Democracy (V-Dem) yang disebut mengklasifikasikan Indonesia sebagai electoral autocracy atau autokrasi elektoral pada 2026. Menurutnya, klasifikasi itu menggambarkan kondisi ketika penyelenggaraan pemilu tetap berlangsung, tetapi kualitas demokrasi substantif dinilai mengalami persoalan.

"Ada lagi ini, dari V-Dem ya, Varieties of Democracy, itu pada tahun 2026 itu mengklasifikasikan negara Indonesia itu sebagai negara autokrasi elektoral atau electoral autocracy, gitu," tuturnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dony Oskaria Kumpulkan Petinggi BUMN, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.31 WIB

BANDA ACEH -Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Pertemuan ini membahas penguatan distribusi kebutuhan masyarakat melalui sinergi antar-BUMN.

Salah satu fokusnya adalah mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terutama dalam

memastikan pasokan energi dan pangan tetap lancar.

"Visi presiden itu sentral distribusi untuk setiap barang bersubsidi lewat Kopdes. Artinya data itu akan ada di Kopdes," kata Dony di Wisma Danantara, dikutip Selasa, 27 Oktober 2026.

BP BUMN dan Danantara Indonesia mengarahkan kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan PIHC untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi melalui jaringan KDKMP di berbagai daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Menkes Minta Semua Rumah Sakit Harus Bisa Tangani Gangguan Jiwa, Tak Hanya RSJ

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.39 WIB

BANDA ACEH - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh rumah sakit di Indonesia mampu menangani pasien dengan gangguan kesehatan mental. Apa alasannya?

Menurut Menkes Budi, pelayanan kesehatan jiwa tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit jiwa (RSJ) karena kebutuhan masyarakat membutuhkan jangkauan layanan yang lebih luas.

Budi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sistem penanganan kesehatan mental secara berjenjang, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah ini diperlukan agar masyarakat yang mengalami gangguan mental bisa

mendapatkan penanganan sesuai kondisi dan tingkat keparahannya.

"Mulai dari seluruh puskesmas, kemudian naik ke rumah sakit, terus ke atas. Kalau dulu hanya punya rumah sakit jiwa khusus, nanti kami akan bilang semua rumah sakit harus bisa menangani kesehatan mental. Karena kalau hanya rumah sakit jiwa enggak akan cukup," kata Budi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Rencana tersebut sejalan dengan hasil skrining kesehatan jiwa yang dilakukan pemerintah atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada 2025, sekitar 70 juta penduduk telah menjalani skrining menggunakan kuesioner untuk

memetakan kondisi kesehatan mental masyarakat.

Dari pemeriksaan tersebut, sekitar 7 juta orang terindikasi mengalami gangguan mental. Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa memiliki beragam jenis, mulai dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder, depresi, hingga skizofrenia.

"Penyakit mental tuh ada jenis-jenisnya. Mulai yang paling rendah namanya anxiety disorder, cemas, itu termasuk masalah kesehatan mental. Naik sedikit namanya depression disorder, depresi. Ada yang namanya skizofrenia, ini yang benar-benar seperti sakit jiwa," ujarnya.

Skrining itu juga mengidentifikasi individu yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Budi menilai, temuan tersebut harus diikuti kesiapan fasilitas kesehatan karena setiap kondisi membutuhkan pendekatan dan perawatan yang berbeda.

"Tantangannya di kami, karena sudah ketemu kan, oh masalahnya sudah ketemu nih, yang mau bunuh diri berapa, ini berapa, sudah ketemu. Kita harus mempersiapkan infrastrukturnya karena perawatannya beda kan," tuturnya.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan mental.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Singapura Ancam Potong Internet Indonesia, Meutya Balas Telak

Oleh Redaksi · 28 Okt, 08.57 WIB



BANDA ACEH - Ancaman potong kabel internet Indonesia dari politikus Singapura bikin geger. Meutya Hafid pun buka suara, mengungkap risiko besar yang bisa berbalik menghantam Singapura.

Pernyataan mantan anggota Parlemen Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, soal kemungkinan pemutusan kabel internet yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan global memicu sorotan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid pun buka suara.

Dia mengingatkan, jika kabel tersebut dipotong, Singapura juga berisiko terkena dampaknya.

Meutya menegaskan, infrastruktur komunikasi bawah laut yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional tidak berdiri sendiri.

Sebagian besar jalur kabel yang mendarat di Singapura juga melintasi perairan Indonesia.

"Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia," kata Meutya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Meutya, ancaman pemotongan kabel internet bukan hanya berpotensi mengganggu konektivitas Indonesia.

Singapura juga bisa menghadapi masalah serius jika infrastruktur tersebut benar-benar terputus.

"Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh," ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena sebelumnya beredar klaim bahwa sekitar 90 persen lalu lintas

internet internasional Indonesia melewati Singapura.

Angka tersebut menggambarkan besarnya ketergantungan konektivitas lintas negara terhadap jalur yang terhubung melalui negara tetangga tersebut.

Namun, menurut Meutya, hubungan digital kedua negara tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi

Meutya merespons ancaman potong internet RI, mengingatkan Singapura juga terancam lumpuh jika kabel terputus. (Foto: KOMDIGI)

Infrastruktur kabel bawah laut merupakan bagian dari jaringan yang saling terhubung dan menopang komunikasi lintas negara.

Meutya juga mengingatkan bahwa Indonesia punya pasar digital yang sangat besar.

Jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 47 kali lipat dari

Singapura, dengan 267 juta masyarakat yang terhubung ke internet, sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya.

Besarnya jumlah pengguna tersebut menjadi salah satu daya tarik Indonesia bagi perusahaan teknologi global.

Karena itu, gangguan konektivitas yang serius berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi, bukan sekadar membuat masyarakat kesulitan mengakses internet.

"Penduduk Indonesia jumlahnya 47 kali lipat dari Singapura. 267 juta masyarakat terhubung ke internet. Tanpa angka ini, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura," kata Meutya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan digital Indonesia dan Singapura saling berkaitan.

NASIONAL

Sidang Roy Suryo Memanas! Refly Harun Emosi dengan Saksi: Sangat Tidak Sopan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 15.57 WIB



BANDA ACEH - Sidang kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memanas ketika tim hukum terdakwa Roy Suryo menganggap saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Maret Samuel Sueken tidak sopan dalam persidangan. Tim kuasa hukum Roy Suryo awalnya meminta saksi agar menjawab sesuai pengetahuannya.

Namun, saksi tersebut memberikan jawaban yang dinilai tidak sopan.

"Nggak usah ajarin saya jawaban saya, Bos!" jawab Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Kubu Roy Suryo menggali mengenai pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa. Sebab Maret juga merupakan orang yang melaporkan Roy Suryo dalam polemik ijazah Jokowi.

Namun jawaban Maret tersebut mengundang keberatan dari salah satu tim hukum Roy Suryo, Refly Harun. Refly menganggap sikap saksi tidak sopan.

"Yang Mulia, Yang Mulia, ya. Kami kan sopan menanyakan, ya kan. Tapi beliau ini menjawab sangat tidak sopan, ya," kata Refly.

"Saya bukan orang-orang bodoh di sini, Yang Mulia. Saya sopan kalau pertanyaannya tepat. Tapi kalau tidak tepat, tidak perlu saya jawab. Saya tidak bisa jawab singkat ya atau tidak," ucap Maret.

"Bisa tidak jawab, tidak apa-apa! Tetapi sopan!" kata Refly dengan nada tinggi.

Hakim kemudian mengambil alih persidangan untuk menenangkan kedua belah pihak. Hakim meminta saksi mendengarkan pertanyaan tim hukum Roy Suryo lebih dulu sebelum memberikan jawaban.

Sementara untuk tim hukum Roy Suryo, hakim meminta agar pertanyaannya lebih disederhanakan agar saksi tidak mengeluarkan pendapat pribadi ketika menjawab.

"Jangan emosi, ya! Sabar biar yang keluar tadi kan seperti yang saudara nyatakan dalam janji, yang benar dan jujur. Begitu kan? Jadi dengarkan dulu pertanyaannya, ya. Jawabnya yang tegas biar tidak mutar-mutar. Pertanyaannya lebih sederhana begitu ya, biar jangan menurut nanti yang keluar pendapat. Silakan," kata Hakim Ketua Christina Endarwati

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Viral! Terekam Injak Tembok Pusara Makam Pahlawan, Pejabat Golkar Sumut Disindir Netizen soal Etika

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.49 WIB

BANDA ACEH – Video Viktor Silaen, pejabat Golkar Sumut, terekam menginjak tembok pusara makam pahlawan saat ziarah. Aksinya viral dan disindir netizen.

Video seorang pejabat Partai Golkar Sumatera Utara saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan mendadak viral di media sosial.

Viktor Silaen, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, menjadi sorotan setelah terekam berdiri di atas tembok pusara makam pahlawan.

Aksinya langsung menuai beragam komentar, termasuk sindiran pedas dari netizen yang mempertanyakan etika dan sikap menghormati para pejuang bangsa.

Peristiwa tersebut terjadi ketika kader Golkar menggelar ziarah

untuk memperingati HUT ke-62 Partai Golkar di Medan, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang semestinya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan itu justru ramai diperbincangkan setelah rekaman videonya beredar luas.

Video tersebut diunggah melalui akun Instagram @kabarsumatera.id sejak Senin (26/10).

Dalam rekaman yang beredar, Viktor terlihat berada di atas bagian tembok pusara sambil menyingsingkan celananya.

Pemandangan itu kemudian memancing perhatian pengguna media sosial karena dianggap berkaitan dengan kepantasan bersikap di area pemakaman.

Berdasarkan informasi dalam unggahan tersebut, kegiatan ziarah diikuti sedikitnya 500 kader Golkar dan dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap.

Sejumlah pengurus turut hadir, di antaranya Viktor Silaen, Benda-hara Umum Mula Rotua Siregar, Rolel Harahap, serta Surhenta Sembiring.

Alih-alih hanya menjadi agenda penghormatan kepada pahlawan, kegiatan tersebut justru memunculkan perdebatan di dunia maya.

Kolom komentar dipenuhi tanggapan warganet yang menyoroti tindakan dalam video tersebut

Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari akun @wisnuhuda2.

Warganet tersebut melontarkan sindiran bernada humor yang kemudian menjadi bagian dari perbincangan mengenai video viral itu.

"Sama Tuhan aja gk takut, apalagi cuma pusara," tulis akun tersebut.

Komentar itu menggambarkan nada kritik sebagian pengguna media sosial terhadap tindakan yang terekam dalam video.

Meski disampaikan dengan gaya bercanda, tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku di area makam menjadi perhatian publik.

NASIONAL

KPK Kembali Janji Segera Panggil Nusron Wahid

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.20 WIB

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berjanji secepatnya memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk mendalami kemungkinan adanya alur perintah dan aliran uang kepada pihak lain.

"Tentunya secepatnya, ya. Karena memang penyidik membutuhkan keterangan dari NW. Apalagi pihak-pihak yang ada di lingkaran NW ini beberapa ditetapkan sebagai tersangka, baik orang kepercayaan maupun juga ada Dirjen, dan beberapa pihak yang juga ada di lingkaran NW ini sudah dilakukan pengeledahan," kata Budi kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut Budi, pemeriksaan Nusron diperlukan untuk mengon-

firiasi berbagai temuan penyidik selama proses penyidikan, sekaligus mendalami apakah perkara tersebut berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan atau masih dapat dikembangkan kepada pihak lain.

"Sehingga nanti overviewnya jelas ya, apa yang terjadi di lapangan, adanya dugaan praktik suap ataupun penerimaan lainnya, ini kemudian ujungnya ke siapa gitu ya. Apakah memang berhenti kepada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian sebetulnya ada alur perintah dari pihak lainnya. Jika memang itu tentu butuh pendalaman. Dari siapa? Termasuk juga soal aliran uang," ujar Budi.

Budi juga menyoroti besarnya nilai uang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) perkara tersebut. Menurutnya, barang bukti yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap pengurusan lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, tetapi juga terdapat uang lain yang diduga berasal dari setoran rutin dan penerimaan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dakwaan Febrie Ungkap Pembelian Aset Miliaran, Tanah di Jambi hingga Properti Mewah Jakarta

Oleh Redaksi · 28 Okt, 08.44 WIB



BANDA ACEH — Surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkap rangkaian transaksi pembelian tanah, bangunan, apartemen, hingga kendaraan bernilai miliaran rupiah.

Sejumlah aset tersebut disebut dalam dakwaan tercatat atas nama perusahaan maupun pihak lain.

Jaksa menguraikan transaksi itu sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang diduga menyamarkan asal-usul uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pengungkapan tersebut termuat dalam surat dakwaan Febrie yang dibacakan pada Rabu (7/10/2026).

Dalam dakwaan bagian G, penuntut umum menjelaskan penggunaan sejumlah rekening

kantor hukum dan rekening perusahaan untuk menerima uang, yang kemudian dipergunakan dalam berbagai transaksi aset.

"Rangkaian perbuatan penerimaan uang melalui beberapa rekening kantor hukum dan rekening DE CLAN KULINARI NUSANTARA sebagaimana telah diuraikan di atas, menyebabkan asal usul dan sumber penerimaan yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut menjadi tidak mudah diketahui," demikian uraian dalam surat dakwaan.

Jaksa juga menyebut Febrie bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin menggunakan sebagian uang tersebut untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang dicatat atau ditempatkan atas nama pihak lain.

Tanah di Bandung, Jambi, hingga Jakarta Selatan

Salah satu transaksi yang diungkap jaksa terjadi pada 23 Oktober 2023. Melalui Nurman Herin yang disebut bertindak sebagai Direktur PT Declan Kulinari Nusantara, Febrie didakwa membeli sejumlah bidang tanah kavling di kawasan Royal Garden Timur, Desa Mekarsaluyu, Kabupaten Bandung.

Dalam uraian dakwaan, pembelian tersebut mencakup 11 bidang tanah dengan luas yang tercantum dalam masing-masing sertifikat. Total luas yang disebut dalam uraian pembelian mencapai 4.395 meter persegi.

Jaksa menyebut harga yang tercantum dalam akta jual beli mencapai Rp18,459 miliar. Namun, harga sebenarnya disebut sebesar

Rp22,1335 miliar. Kepemilikan tanah tersebut dicatat atas nama PT Declan Kulinari Nusantara.

Tak hanya di Bandung, dakwaan juga menguraikan pembelian sejumlah bidang tanah di Desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Puluhan bidang tanah dengan luas beragam disebut menggunakan sertifikat atas nama Don Ritto, Hasya Yanto, Nurman Herin, dan Putri Liesdianthi. Beberapa bidang memiliki luas mendekati lima hektare, sehingga rangkaian transaksi itu mencakup hamparan tanah dalam skala besar.

Dakwaan juga mencatat pembelian tanah di Desa Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat.

NASIONAL

Disebut Jadi Kehilangan Terbesar dalam Perjalanan Politik Jokowi, Apa Itu?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.28 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan hal yang dinilainya menjadi salah satu kehilangan terbesar dalam perjalanan Politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut Adi, salah satu kehilangan tersebut adalah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP). Ia berpandangan, jika Jokowi masih menjadi kader PDIP, komunikasi politik dengan partai lain berpotensi lebih mudah dilakukan.

Pasalnya, menurut Adi, para ketua umum partai politik terkeasan menjaga jarak dari Jokowi setelah ia lengser dari jabatan presiden. Mereka dinilai tidak terlihat mengunjungi Jokowi secara terbuka di kediamannya di Solo sejak ia tak lagi menjabat sebagai presiden.

"Dan saya selalu membayangkan, tapi kalau Pak Jokowi masih DPDP gampang berkomunikasi dengan partai yang lainnya," ujar Adi dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Rabu (28/10).

Adi menilai, renggangnya hubungan Jokowi dengan para ketua umum partai politik tidak hanya disebabkan oleh berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan politik di kalangan elite.

"Jadi bukan hanya tak lagi dengan PDIP, bukan tak lagi menjadi presiden, tapi variabel-variabel perkawanan elit inilah yang kemudian juga turut mendi-namisir betapa Pak Jokowi itu terkesan agak sedikit putus hubungan dengan ketua umum-ketua umum partai politik yang lainnya. Kan kayak gitu jalan ceritanya," lanjutnya.

Oleh karena itu, ia berpendapat salah satu kehilangan terbesar Jokowi adalah ketika PDIP memecatnya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, keputusan tersebut membuat akses Jokowi untuk membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak menjadi lebih sulit hingga saat ini.

NASIONAL

Beredar Poster Rapat Pemakzulan Gibran, Ini Kata Yusril

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.27 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal beredarnya poster undangan konferensi pers bertajuk 'Audiensi Persiapan Skenario Pemberhentian Wapres Gibran'. Yusril menegaskan poster tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari pihaknya. Yusril menjelaskan, poster itu mengklaim ada audiensi kepada dirinya namun tanpa pemberitahuan resmi.

"Sebenarnya ingin audiensi kepada saya tapi enggak ada pemberitahuan surat," ujar Yusril di sela konferensi Hari Sumpah Pemuda ke-98 di gedung Makara UI, Rabu (28/10).

Yusril menegaskan kegiatan tersebut bukan inisiatif dari kementerian. Bahkan, alamat kantor

yang tercantum dalam poster juga salah.

"Jadi jelas itu bukan inisiatif, bukan dari pihak Kementerian, apalagi alamatnya salah. Kami kan sudah bukan di situ kantornya," tegasnya.

Ia menjelaskan, kantor Kemenko Kumham Imipas sudah pindah ke gedung di depan Kedutaan Besar Malaysia, bukan di alamat lama yang tercantum di poster.

"Kami sudah pindah ke gedung di depan Kedutaan Malaysia. Itu bisa datang ke kantor yang lama," pungkasnya.

Sebelumnya, Kemenko Kumham Imipas telah memberikan stempel HOAX pada poster yang beredar di media sosial tersebut dan menyatakan pernyataan terkait pemakzulan Wapres tidak pernah diucapkan oleh Yusril.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

2 Anak Menhaj Mundur dari Tenaga Ahli, Kemenhaj Segera Cari Pengganti

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.25 WIB

BANDA ACEH - Dua anak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Surat pengunduran diri keduanya telah diterima pada Senin (26/10/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pengangkatan dua anak Gus Irfan sebagai tenaga ahli menjadi sorotan publik.

"Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita ya itu yang disampaikan juga oleh publik, diputuskan, beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan

diri," ujar Dahnil kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, Dahnil memastikan Kemenhaj akan mencari tenaga ahli pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Barbarossa dan Gibran. Penunjukan tenaga ahli baru nantinya menjadi kewenangan Menhaj.

"Jadi kami akan isi tenaga ahli dengan orang lain. Nanti kita lihat dan itu tentu adalah kebijakan Pak Menteri," tuturnya.

Dahnil menjelaskan, pengangkatan kedua anak Gus Irfan sebagai tenaga ahli bermula dari kebutuhan tenaga pendukung operasional Kemenhaj pada awal pembentukan lembaga tersebut.

Menurutnya, saat itu Badan Penyelenggara Haji yang menjadi cikal bakal Kemenhaj hanya

memiliki dua pimpinan, yakni menteri dan wakil menteri. Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendukung untuk menjalankan operasional menjadi mendesak.

"Akhirnya salah duanya itu adalah anaknya Pak Menteri ikut membantu sejak awal, karena saya juga enggak ada yang membantu waktu itu karena Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu kepala dan wakil kepala," ucap Dahnil.

Dia menambahkan, keputusan mundur diambil setelah muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pengangkatan keduanya sebagai tenaga ahli.

"Nah, tapi karena ada sebutlah ini keributan, ada pro-kontra ter-

kait dengan ini, maka beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai tenaga ahli. Bukan mengundurkan diri sebagai putranya Pak Menteri. Nanti akan salah nanti. Mengundurkan diri sebagai tenaga ahli Kementerian Haji dan Umrah. Tapi tetap sebagai putranya Pak Menteri Haji dan Umrah," pungkasnya.

Sebelumnya, Gus Irfan buka suara soal pengangkatan anaknya sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, keterlibatan anaknya sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Selesaikan Kasus Gibran Lewat Prosedur Ketatanegaraan

A group of men are standing in a room. In the foreground, a man in a black shirt is looking towards the right. To his left, a man in a white shirt is smiling. In the background, a man in a white shirt with a beard and glasses is looking forward. Other people are visible in the background, some in blue shirts.

Massa Desak Gibran Mundur Datangi Rumah Jokowi di Solo, Titip 2 Surat Lewat Paspampres





Bank Aceh



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Mahfud MD Soal 2 Tahun Prabowo: Ide Bagus tapi Eksekusi Hancur, Korupsi Menggila dan Hukum Diakali



NASIONAL

Tolak Usul Luhut, PKS Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara

Oleh Redaksi · 28 Okt, 08.25 WIB



BANDA ACEH - Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mendukung sikap Pemerintah terkait aspek kerugian negara (KN) dalam definisi korupsi.

Dia mendorong Pemerintah berhati-hati terhadap usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) agar unsur kerugian negara tidak termasuk tindak korupsi.

Menurutnya, kehati-hatian Pemerintah dalam mengkaji usulan tersebut merupakan langkah penting agar reformasi hukum tidak justru melemahkan perlindungan terhadap keuangan dan kekayaan negara.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 menilai bahwa wacana mengeluarkan unsur kerugian negara dari definisi tindak pidana

korupsi perlu dikaji secara mendalam. Sebab, kerugian negara merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum.

“Kita mendukung upaya penyempurnaan hukum antikorupsi. Namun, jangan sampai atas nama reformasi, ketentuan hukum yang selama ini melindungi kekayaan negara justru diperlemah. Kerugian negara tetap harus menjadi salah satu unsur penting dalam pemberantasan korupsi,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurut dia, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang kerap dijadikan rujukan dalam wacana tersebut tidak mengharuskan setiap tindak

pidana korupsi menimbulkan kerugian negara. Namun, bukan berarti UNCAC melarang negara memasukkan kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi. UNCAC bahkan mengatur berbagai bentuk korupsi di luar penyuapan, termasuk penggelapan aset publik dan penyalahgunaan fungsi jabatan.

“Semangat UNCAC adalah memperluas jangkauan pemberantasan korupsi, bukan mempersempitnya. Karena itu, penerapannya harus dilakukan secara utuh dan sesuai kebutuhan hukum nasional,” jelasnya.

Mulyanto memahami bahwa tidak setiap kerugian negara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Dalam pengelolaan BUMN dan investasi negara, terdapat risiko bisnis yang wajar dan

harus memperoleh perlindungan hukum. Namun, hal tersebut tidak boleh mengaburkan batas antara risiko bisnis yang sah dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

“Kita perlu melindungi pengambil keputusan yang profesional dan beritikad baik. Tetapi pada saat yang sama, negara harus tetap memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menindak penyimpangan yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Mulyanto menambahkan bahwa prinsip tersebut semakin penting dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara yang memiliki kewenangan investasi sangat besar. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama tata kelolanya.

NASIONAL

Rumah Jokowi di Solo Digeruduk Massa Pejuang Merah Putih, Desak Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.06 WIB



BANDA ACEH - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Mereka mendesak Jokowi agar meminta putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mundur dari Wakil Presiden (Wapres).

Rombongan tiba di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pukul 11.00 WIB. Gang tersebut merupakan akses utama menuju kediaman Jokowi.

Setibanya di ujung gang, perwakilan massa membacakan dua surat yang ditujukan kepada Jokowi.

Juru bicara aksi, Bangun Satoto mengatakan, surat tersebut berisi sejumlah tuntutan dan kritik terhadap mantan presiden tersebut. “Kami akan menyampaikan dua lembar surat,” kata Bangun Satoto.

Surat pertama ditulis tangan dan berisi permintaan agar Jokowi tidak melabeli pihak yang mempertanyakan ijazahnya maupun ijazah Gibran dengan istilah operasi Politik dan penumpang gelap.

Sementara itu, surat kedua berisi kritik terhadap dugaan

ambisi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politiknya melalui keberlanjutan rezim di tengah masyarakat. Massa menilai sikap tersebut kurang etis dan tidak mendidik.

Mereka juga meminta Jokowi mengambil langkah agar Gibran bersedia mundur dari jabatan wakil presiden. Menurut massa, langkah tersebut diperlukan untuk menghindari proses pemakzulan yang dinilai dapat mencoreng kehormatan Gibran.

“Kami meminta agar Bapak (Jokowi) bersedia memaksa saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden. Agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” ucapnya.

Usai membacakan surat di hadapan awak media, massa ditemui salah seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertugas mengawal Jokowi. Surat tersebut diterima untuk selanjutnya diteruskan kepada Jokowi.

Setelah menyerahkan surat dan menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri. Belum ada keterangan dari Jokowi maupun Gibran terkait tuntutan tersebut

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Nusron Wahid Dikabarkan Dipanggil KPK 28 Oktober, MAKI Desak Jemput Paksa jika Mangkir

Oleh Redaksi · 27 Okt, 13.43 WIB

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak bertindak tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (28/10/2026).

KPK bahkan diminta mempertimbangkan upaya membawa paksa apabila Nusron kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang mengaku memperoleh informasi dari dua sumber yang dinilainya memiliki tingkat kepercayaan tinggi bahwa surat panggilan kepada Nusron telah dikirimkan untuk pemeriksaan besok.

“Semoga Nusron Wahid hadir. Tapi kalau tidak hadir, KPK harus tegas, betul-betul menerbitkan surat perintah membawa, atau istilah kerennya dijemput paksa,” ujar Boyamin kepada Monitorindonesia.com, Selasa (27/10/2026).

Menurut Boyamin, pemanggilan untuk 28 Oktober bukan sekadar panggilan kedua dalam pengertian biasa.

Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat pemanggilan yang dijadwalkan ulang setelah Nusron disebut meminta penundaan karena memiliki agenda di kantor.

Namun, Boyamin mengklaim Nusron justru bepergian ke Johor Bahru, Malaysia, pada Kamis ketika pemeriksaan yang dijad-

walkan ulang itu seharusnya berlangsung.

Setelah itu, menurut dia, KPK menerbitkan surat panggilan berikutnya untuk pemeriksaan pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Informasi mengenai pengiriman surat panggilan, alasan penundaan, dan perjalanan ke Malaysia tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada KPK maupun pihak Nusron.

KPK Diminta Tidak Berkompromi

Boyamin menegaskan, apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, KPK harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan Dewan Pengawas KPK agar menjalankan

fungsi pengawasan apabila penanganan perkara dinilai tidak sesuai prosedur.

“Kalau tidak jemput paksa, berarti KPK memang melanggar kode etik dan saya akan lebih mempercayakan pada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi dan teguran,” kata Boyamin.

Pernyataan tersebut merupakan desakan Boyamin.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik maupun dasar untuk membawa paksa tetap harus merujuk pada ketentuan yang berlaku dan fakta penanganan perkara.

Boyamin juga menyatakan bahwa Nusron masih dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.

NASIONAL

Demo 28 Oktober Ricuh Dekat Halte Tosari, Polisi Bermotor dan Bertameng Dikerahkan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 18.31 WIB



BANDA ACEH - Aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda dekat Halte Busway Tosari, Jakarta Pusat, ricuh pada Rabu (28/10/2026). Polisi dan massa terlibat ketegangan hingga terjadi aksi saling lempar botol dan pembatas jalan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah massa berusaha bergerak menuju Gedung UOB untuk bergabung dengan elemen mahasiswa yang lebih dulu menggelar aksi. Namun, langkah mereka terhalang barikade polisi bermotor dan bertameng.

Situasi kemudian memanas. Massa dan polisi terlihat berlarian sambil berteriak satu sama lain di sekitar halte.

Ketegangan juga diwarnai aksi saling lempar benda, termasuk botol dan pembatas jalan. Polisi berupaya menghalau pergerakan massa agar tidak bergabung dengan kelompok mahasiswa di depan Gedung UOB.

Hingga berita ini ditulis, situasi di sekitar Halte Busway Tosari masih tegang. Personel kepolisian bersiaga menghadang massa yang berusaha bergerak menuju lokasi demonstrasi mahasiswa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tragedi Berdarah di Sungai Apit Siak: Seorang Polisi Tega Habisi bu Kandungnya

Oleh Redaksi · 28 Okt, 09.01 WIB



BANDA ACEH - Seorang pensiunan guru berinisial FH, 64, tewas dengan sejumlah luka tusuk

Dia ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Gajahmada, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, pada Selasa (27/10) subuh.

Pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang merupakan seorang anggota Polri yang berinisial WP, 37.

Peristiwa kelim ini sontak mengejutkan warga sekitar. Kepolisian Resor Siak bergerak cepat mengamankan pelaku tak lama setelah jasad korban ditemukan oleh warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku.

Dikutip dari Riau Pos (Jawa⁷Pos Group), kasus pembunuhan ini pertama kali terungkap berkat

kecurigaan seorang saksi bernama Afrina Ramayana Daulay.

Sekitar pukul 06.30 WIB, saksi melihat terduga pelaku keluar dari rumah korban.

Kepada warga, WP sempat melontarkan kalimat janggal bahwa ibunya sedang tidur dengan nyaman sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi.

Pelaku sempat mendatangi tetangga untuk meminta uang tunai dan meminta diantarkan ke kawasan Pasar Sungai Apit dengan tergesa-gesa.

Rasa curiga yang semakin besar membuat para tetangga memutuskan untuk memeriksa kondisi di dalam rumah korban.

Setelah mendobrak pintu yang terkunci, saksi mendapati Farida Hanum sudah tergeletak tak ber-

nyawa dalam kondisi telungkup di atas kasur ruang televisi dengan ceceran darah di sekitar tubuhnya.

Penangkapan Cepat oleh Pihak Kepolisian

Warga setempat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Apit. Berbekal laporan cepat dan informasi dari seorang sopir travel, tim kepolisian berhasil melacak keberadaan WP di sekitar Jalan Hang Tuah, Kelurahan Sungai Apit, sekitar pukul 07.30 WIB.

"Tak perlu waktu lama bagi kami untuk membekuk terduga pelaku," ujar Kasat Reskrim AKP Dr Raja Kosmos dikutip Rabu (28/10).

Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau bergaris

darah dengan gagang hijau, sebilah pisau lipat bernoda darah, tas ransel, tas tangan, serta perhiasan milik korban berupa gelang dan sepasang anting emas. Saat ini, jenazah korban telah diautopsi dan barang bukti dikirim ke Laboratorium Forensik (Labfor).

Pelaku Jalani Rawat Jalan Psikis Pihak kepolisian memastikan bahwa pelaku WP merupakan anggota Polri yang berdinasi di Biddokkes Polda Riau.

Berdasarkan keterangan penyidik, pelaku saat ini tengah menjalani rawat jalan akibat kondisi psikisnya yang terganggu.

NASIONAL

Mencekam! Kadispar Sultra Dikepung Massa usai Diduga Fitnah Anggota DPR di Medsos

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.14 WIB



BANDA ACEH – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulawesi Utara (Sultra) , Ridwan Badallah, dikepung massa saat tengah bekerja di kantornya yang berlokasi di Jalan Tebaununggu II, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Rabu (28/10/2026).

Kedatangan massa tersebut untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan konten di akun TikTok pribadi milik Ridwan Badallah yang diduga mengandung unsur fitnah terhadap anggota DPR Dapil Sultra, Ridwan Bae.

Suasana di dalam ruangan kerja Kadispar Sultra sempat memanas. Ridwan Badallah bahkan nyaris menjadi sasaran amuk massa yang emosi dengan unggahan video tersebut.

Beruntung, sejumlah orang di lokasi cepat meredam situasi sehingga keributan tidak meluas dan kondisi kembali terkendali.

Usai melakukan dialog cukup alot dengan perwakilan massa, Kadispar Sultra Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada anggota DPR Ridwan Bae. Dia juga bersedia menghapus konten yang dipersoalkan dari akun TikTok pribadinya.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bapak Ridwan Bae atas unggahan tersebut dan bersedia menghapus konten di akun TikTok pribadi saya," ujar Kadispar Sultra, Ridwan Badallah, di hadapan massa.

Koordinator Massa, Nusman menegaskan, aksi penggerebekan yang mereka lakukan bukan bentuk aksi premanisme, melainkan upaya konfirmasi langsung atas tuduhan yang dilemparkan oleh pejabat publik di media sosial.

"Kedatangan kami ke sini bukan untuk melakukan aksi premanisme, melainkan untuk mengonfirmasi langsung kepada Kadispar Sultra terkait pernyataannya di akun TikTok yang merugikan dan diduga memfitnah Anggota DPR RI Pak Ridwan Bae," kata Nusman.

Setelah mendengar langsung permohonan maaf dari Kadispar Sultra serta kepastian penghapusan konten tersebut, puluhan massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan area Kantor Dinas Pariwisata Sultra dengan tertib

[» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Edy Mulyadi : Bola Kasus Pendidikan Gibran Kini di DPR, Pansus dan Hak Angket Mulai Mengemuka

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.14 WIB

BANDA ACEH – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai DPR RI mulai membuka ruang pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah fraksi disebut mulai menjajaki pembentukan panitia khusus (pansus) maupun penggunaan Hak Angket.

Menurut Edy, perkembangan tersebut patut dicermati karena persoalan yang sebelumnya menjadi perdebatan di ruang sidang dan ruang publik kini mulai memasuki ranah parlemen.

"Bola Politik pun mulai menggelinding. Pertanyaannya, adakah yang cukup berani menendangnya ke arah gawang?" tulis Edy dalam opininya, Senin (26/10/2026).

Edy merujuk putusan MK pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam perkara tersebut, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, menurut Edy, pertimbangan hukum MK mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap perlu mendapat perhatian. Ia menyoroti keterangan dalam pertimbangan putusan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan SMA atau sederajat.

Edy menegaskan bahwa putusan tersebut tidak serta-merta berarti MK memutuskan pemakzulan

Gibran. Meski demikian, ia berpandangan, persoalan dokumen pendidikan dan proses penyetaraannya perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.

Pansus dan hak angket masih sebatas peluang

Edy menyebut sejumlah perkembangan politik di DPR sebagai alasan untuk mencermati kemungkinan penyelidikan lebih lanjut. Ia menyoroti sikap PDIP yang membuka peluang pembentukan pansus atau penggunaan hak angket, komunikasi lintas fraksi yang disebut mulai berlangsung di PKS, serta usulan dari PKB untuk mengklarifikasi dokumen pendidikan, proses penyetaraan, dan prosedur verifikasi.

Komisi II DPR juga disebut

akan mengkaji putusan MK tersebut secara komprehensif.

Namun, Edy mengingatkan bahwa pembicaraan tersebut belum dapat diartikan sebagai kesepakatan resmi untuk menggunakan hak angket. Golkar, misalnya, menilai persoalan itu dapat dibahas melalui Komisi II tanpa harus membentuk pansus atau menggunakan hak angket. Sejumlah fraksi lainnya juga belum menunjukkan komitmen resmi untuk melangkah ke tahap penyelidikan.

"Artinya, jalan masih panjang. Tetapi, pintu belum tertutup," tulisnya.

Ia kemudian menyoroti komposisi DPR periode 2024–2029 yang beranggotakan 580 orang.

NASIONAL

Jokowi seperti Menghindar Hadiri Sidang Ijazah

Oleh Redaksi · 28 Okt, 15.53 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi seperti sudah tidak tertarik lagi dengan sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Demikian pandangan Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, dikutip Rabu 28 Oktober 2026.

Buktinya, meski sidang terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dan Roy Suryo telah berlangsung berkali-kali, namun Jokowi pernah nongol, apalagi membawa ijazah aslinya.

"Padahal Dokter Tifa dan Roy Suryo ingin sekali Jokowi dan ijazahnya dihadirkan. Tapi Jokowi seperti takut hadir. Menghindar," kata Erizal.

Sikap Jokowi yang belum datang ke persidangan jelas sangat disesalkan. Karena sebelum Roy Suryo dan Dokter Tifa duduk sebagai terdakwa, Jokowi dan kuasa hukumnya seperti ingin sekali hadir besok pagi ke persidangan.

"Tapi saat Dokter Tifa dan Roy Suryo sudah berminggu-minggu duduk sebagai terdakwa, keinginan Jokowi itu hilang ditelan malam," kata Erizal.

Menurut kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, kliennya akan hadir kalau diundang JPU.

"Segitu rumitnya sidang ijazah ini. Jokowi terlihat memang lebih fokus mengurus PSI," pungkas Erizal

[» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](#)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Mengaku Imam Mahdi, Pria di Bangkalan Diduga Tipu Pengikut hingga Rp1,3 Miliar

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.10 WIB



BANDA ACEH – Seorang pria berinisial FF, warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan pemerasan terhadap sejumlah pengikutnya. Korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp1,3 miliar.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga bernama Halimi melaporkan FF ke Polres Bangkalan pada Rabu (21/10/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyerahan uang secara bertahap kepada terlapor.

Kuasa hukum korban, Jailani Muhtadi, mengatakan FF diduga mengaku sebagai Imam Mahdi untuk mendapatkan kepercayaan para pengikutnya.

Menurut Jailani, korban mengaku diminta menyerahkan uang dengan berbagai alasan, mulai dari penebusan dosa, perpanjangan usia atau top up umur, hingga janji keselamatan bagi diri sendiri dan anggota keluarga.

Selain itu, terdapat dugaan permintaan uang untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai tokoh spiritual. Kuasa hukum korban menduga permintaan tersebut memanfaatkan ketakutan dan keyakinan para pengikut.

Kasus ini diduga tidak hanya dialami Halimi. Belasan pengikut FF lainnya disebut mengalami kejadian serupa dengan nilai kerugian yang berbeda-beda.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyoroti kasus tersebut.

Masyarakat diingatkan agar lebih berhati-hati terhadap klaim keagamaan yang digunakan untuk meminta uang atau menjanjikan keselamatan.

Sementara itu, Polres Bangkalan telah menerima laporan korban dan masih mendalami dugaan penipuan tersebut. Pada Selasa (27/10/2026), penyidik memeriksa tiga saksi untuk mengumpulkan keterangan terkait perkara itu.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Dugaan penipuan dan pemerasan yang dilaporkan terhadap FF belum terbukti secara hukum dan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan

NASIONAL

PKS Sebut PDIP Sambut Baik Usulan Hak Angket Ijazah Gibran di DPR

Oleh Redaksi · 28 Okt, 12.42 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengaku telah membangun komunikasi dengan sejumlah partai Politik terkait aspirasi masyarakat tentang usulan pembentukan Hak Angket Ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Salah satu komunikasi yang sudah dibangun yakni dengan PDI Perjuangan (PDIP). Kholid menyebut, partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri itu menyambut baik aspirasi tersebut.

"Terakhir komunikasi dengan sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait 'Ijazah

Gate' ini," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, PKS akan terus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membahas usulan hak angket polemik ijazah Gibran ini.

"Nanti kita lihat respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak ya," ujarnya.

Sebelumnya, aliansi masyarakat sipil mendorong penggunaan hak angket DPR guna membentuk pansus mengusut ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil, Ray Rangkuti menyampaikan, partai politik dan legislator

perlu melihat proses kilat penyetaaraan pendidikan SMA atau tingkat setara dari Gibran. Dia tak ingin pemilu sebagai ruang demokratis justru menjadi pintu melakukan kecurangan.

"Jadi, angket nanti, tentu angket itu bisa membentuk pansus yang berhubungan untuk menyelidiki soal ijazah Saudara Gibran. Karena sekarang ini kan, pengikut Gibran lah, partai pendukung Gibran itu selalu menyebut bahwa ijazah itu ada. Karena itu biar dibongkar bersama-sama," kata Ray, Senin (12/10/2026)

NASIONAL

Demo di Palopo Sandera Truk Kontainer untuk Orasi, Mahasiswa Desak Menhut Mundur

Oleh Redaksi · 28 Okt, 18.39 WIB



BANDA ACEH - Sejumlah mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar demonstrasi dengan menjadikan truk kontainer sebagai panggung orasi, Rabu (28/10/2026). Mereka menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mendesak pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Aksi pertama dilakukan Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya di gerbang masuk Kota Palopo. Massa menyandera sebuah truk kontainer untuk dijadikan panggung menyampaikan aspirasi.

Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Menteri Kehutanan mundur dari jabatannya. Mereka

menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan kebakaran lahan yang menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia dan negara tetangga terdampak kabut asap.

"Kami membawa tuntutan mengenai kebakaran hutan dan lahan," kata Juna, salah satu mahasiswa di lokasi.

Sebagai bentuk protes, massa juga membakar ban bekas dan mengecat tubuh mereka dengan warna merah.

Aksi mahasiswa lainnya digelar oleh kelompok yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di perempatan Kantor Wali Kota

Palopo. Mereka menyoroti persoalan pendidikan, terutama nasib guru honorer dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Mahasiswa mendesak pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer serta meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka juga meminta Presiden berkomitmen merealisasikan berbagai janji Politik, khususnya di bidang pendidikan.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan karhutla dan memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia

NASIONAL

Jokowi Dihadirkan ke Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa 5 November 2026

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.00 WIB



BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya menjalankan pemanggilan terhadap saksi pelapor yakni Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke persidangan kasus tuduhan ijazah palsu pada 5 November 2026. Hal itu disampaikan JPU sebelum persidangan terdakwa Roy Suryo ditutup majelis hakim, Rabu (28/10/2026).

"Mohon izin Yang Mulia, kami akan melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama Ir H Joko Widodo dan Syarif Muhammad Fitriansyah," kata JPU di ruang

sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Namun, JPU meminta majelis hakim agar kehadiran Jokowi di PN Jaktim juga sekaligus menjadi saksi atas terdakwa lain yakni Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

"Kami memohon waktu agar disidangkan di hari yang sama dengan Tifa. Jadi penundaannya pada hari Kamis pada tanggal 5 November 2026 mengingat dengan acara keselamatan Yang Mulia, dan keamanan," kata JPU.

Hakim Ketua Christina Endarwati pun mengizinkan kehadiran Jokowi dalam persidangan Tifa. Namun, jamnya akan dipisah dengan terdakwa Roy Suryo meski di hari yang sama.

"Nggak digabung (sidangnya), harinya saja (yang sama)," kata Christina.

Diketahui, Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan terdakwa dalam kasus ijazah Jokowi. Keduanya dijerat pasal berlapis yakni pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran UU ITE lantaran menuduh ijazah Jokowi palsu

NASIONAL

Sidang Roy Suryo Kasus Ijazah Jokowi Masuk Pembuktian, Jaksa Bakal Hadirkan 94 Saksi

Oleh Redaksi · 28 Okt, 10.01 WIB



BANDA ACEH - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo memasuki tahap pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana menghadirkan 94 saksi dan 26 ahli dalam persidangan tersebut.

"Ada keterangan saksi sebanyak sekira nantinya akan mungkin sebanyak 94 orang sebagaimana dalam berkas perkara, namun kami tetap akan memperhatikan terkait dengan relevansi saksinya," kata JPU di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (28/10/2026).

Selain saksi, jaksa juga bakal menghadirkan 26 ahli sebagai-

mana tercantum dalam berkas perkara. Namun, jumlah yang akan dihadirkan tetap mempertimbangkan relevansi keterangan mereka dengan perkara yang disidangkan.

"Kemudian ahli sebanyak 26 orang sebagaimana dalam berkas perkara dan akan kami perhatikan juga terkait dengan relevansinya," ucap jaksa.

Untuk membuktikan dakwaan, JPU juga akan mengajukan sejumlah alat bukti lain, termasuk bukti surat, barang bukti, dan bukti elektronik. Jaksa turut menyampaikan rencana menghadirkan keterangan terdakwa dalam rangkaian pembuktian.

"Kami juga ada alat bukti surat, kemudian dilanjutkan dengan

keterangan terdakwa, barang bukti, dan juga bukti elektronik, Majelis, mohon izin," jelasnya.

Perkara yang menjerat Roy Suryo berawal dari serangkaian pernyataan, unggahan, dan penyampaian informasi melalui media sosial. Dalam perkara tersebut, Roy Suryo mempersoalkan keaslian ijazah S-1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada sidang pembuktian perdana ini, JPU berencana menghadirkan tiga orang saksi. Namun, dua saksi yang hadir dalam persidangan tersebut yakni Lechumanan dan Maret Samuel Sueken

NASIONAL

Teriakan Revolusi, Mahasiswa Paksa Terobos Barikade Polisi untuk Bisa ke Bundaran HI

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.19 WIB



BANDA ACEH - Ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa mencoba untuk menerobos barikade aparat kepolisian, dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (8/10). Massa aksi terlihat bersitegang dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan.

Pantauan JawaPos.com, massa meneriakkan yel-yel revolusi sebagai bentuk perlawanan dalam aksinya, sambil mencoba menerobos barikade aparat kepolisian untuk bisa sampai ke Bundaran Hotel Indonesia. Sebab, kini mereka ter-

tahan di depan Gedung UOB, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Namun, pihak kepolisian juga tampak tak goyah dan tak membiarkan massa maju lebih lanjut ke arah Bundaran HI.

Dalam aksi ini, massa membawa lima tuntutan. Pertama, menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Kedua, wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan

Politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga, turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Keempat, stop penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN.

Kelima, kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggaran HAM dan hentikan militerisasi ruang sipil

NASIONAL

Ternyata Ini Motif Dwi Bagus, Bunuh, Bakar, Giling Istri Siri dan Anaknya di Madiun, Akhirnya Terungkap

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.30 WIB



BANDA ACEH - Dwi Bagus Martono (DBM) tega membunuh istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4, di salah satu hotel Madiun.

Itu setelah dia merasakan emosi yang memuncak setelah cecok dengan korban pada, Minggu (20/9/2026).

Dirreskrim Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan cecok itu dipicu kecemburuan korban terhadap tersangka, karena merasa dibiarkan setelah diajak menginap pada Sabtu (19/10).

Padahal, rencana menginap itu untuk merayakan ulang tahun anak korban. "Jadi, dapat saya jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan memang pada waktu itu antara korban dengan pelaku mau ada acara ulang tahun anaknya.

Makanya mereka melakukan menginap di hotel itu pada tanggal 19 September 2026," kata Roy di Mapolda Jatim, Selasa (27/10).

Namun, setelah sesaat setelah chekin, istri sah pelaku minta untuk dijemput setelah melakukan aktivitas dari luar.

"Nah, pada tanggal pada saat tanggal 19 itu juga istri sahnya ini minta dijemput ya dari luar sehingga dibuatlah alasan oleh si tersangka ini mobil dalam keadaan rusak kepada korban. Namun, korban sudah berhasil dimasukkan ke hotel tanggal 19," katanya.

Pelaku pun pergi untuk menjemput istri sahnya dan kembali lagi pada keesokan harinya, Minggu (20/9).

"Pada tanggal 20 dia datang. Si tersangka ini datang menemui korban. Nah, di situlah terjadi emosi yang meluap gitu.

NASIONAL

Kerugian Negara Tidak Masuk Korupsi, Sarifuddin Sudding Sebut Pernyataan Luhut Kontraproduktif

Oleh Redaksi · 28 Okt, 10.09 WIB



Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai, pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan tentang kerugian negara tidak masuk dalam korupsi adalah pernyataan kontraproduktif.

"Pernyataan Luhut sebenarnya kontra produktif karena salah satu unsur dalam korupsi adalah kerugian negara," kata Sudding saat dihubungi monitorindonesia.com, Rabu (28/10/2026).

Kata politisi PAN itu, bila kerugian negara dihapus dari korupsi, akan semakin banyak pengguna anggaran menyalahgunakan anggaran negara.

"Para pengguna anggaran akan lebih leluasa atau merajalela menggunakan anggaran negara tanpa ada pertanggungjawaban. Akan ada modus baru yang dipakai oleh kuasa pengguna anggaran. Dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan anggaran negara," jelas Sudding.

Pernyataan Luhut, sambung Sudding, merupakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

"Jelas ya, kerugian negara tidak masuk dalam korupsi, kemunduran dalam pemberantasan korupsi," tambah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Kedua atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Sudding mengatakan, belum ada rencana Komisi III DPR untuk membahasnya.

"Belum ada dinda," kata Sudding.

Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Politisi NasDem itu mengatakan, Komisi III DPR RI lebih fokus membahas RUU Perampasan Aset dibanding merevisi UU Tipikor.

"Belum, masih dialektika. Kami kan enggak boleh mengatasnamakan komisi ya karena kita kan pendapat-pendapat personal," ujar Lallo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

6 BERITA

ACEH

Anggaran Terbatas, BNNP Aceh Ajak Masyarakat Bersama-sama Berantas Narkoba

Oleh Redaksi · 28 Okt, 19.28 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Anggaran terbatas membuat ruang gerak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam memberantas peredaran narkotika masih terkendala. Dari total anggaran Rp18 miliar yang tersedia pada 2026, hanya sekitar Rp1 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan narkoba di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani dalam kegiatan silaturahmi bersama wartawan di Rabu (28/10/2026).

Ia mengatakan, sekitar Rp16 miliar dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai. Sementara itu, anggaran yang tersisa harus dibagi untuk kebutuhan operasional dan kegiatan pemberantasan narkotika.

“Pada 2026, BNNP Aceh memperoleh anggaran Rp18 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai. Dengan demikian, anggaran yang tersedia untuk

kebutuhan lainnya sangat terbatas,” kata Dedy dalam kegiatan silaturahmi bersama wartawan di Rabu, 28 Oktober 2026.

Dedy menjelaskan, dari sisa anggaran sekitar Rp2 miliar, separuhnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor, seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas. Adapun Rp1 miliar lainnya dialokasikan untuk kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga penindakan narkotika.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi salah satu tantangan bagi BNNP Aceh dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika. Meski demikian, lembaga itu tetap melakukan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba.

Sepanjang 2026, BNNP Aceh telah melakukan lima kali penindakan. Namun, hanya dua kegiatan yang dibiayai oleh negara, sedangkan tiga lainnya menggunakan biaya sendiri.

“Sepanjang 2026, kami telah melakukan lima kali penindakan. Dua kegiatan dibiayai oleh negara,

sementara tiga lainnya kami tanggung dengan biaya sendiri,” ujar Dedy.

Ia mengatakan, pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan masyarakat. Menurut dia, upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum karena pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

“Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Aceh. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata dia.

Komisi III DPR RI Dorong Penguatan Anggaran

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. T. Ibrahim, ST, MM, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi BNNP Aceh.

ACEH

Wakil Wali Kota Sabang Tekankan Peran Generasi Muda saat Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98

Oleh Redaksi · 28 Okt, 13.08 WIB



Foto bersama Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus setelah memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Sabang, Rabu (28/10). FOTO/Dok. Pemkot Sabang.

SABANG - Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Sabang, Rabu (28/10).

Momentum ini menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dalam upacara tersebut, Suradji bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya membangun generasi muda yang patriotik, gigih, dan berempati.

Sejalan dengan pesan tersebut, Suradji mengatakan generasi

muda perlu terus mengembangkan potensi diri dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan semangat persatuan serta kepedulian terhadap sesama.

“Generasi muda harus terus berkarya, mengikuti perkembangan zaman, dan gigih berupaya menghadapi berbagai tantangan,” ujar Suradji.

Wakil Wali Kota Sabang menambahkan, semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, kerja keras, dan pengabdian.

Menurutnya, karakter yang kuat dan kepedulian sosial menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam pembangunan.

“Pemuda harus mampu menghasilkan karya dan inovasi yang ber-

manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga persatuan dan kepedulian terhadap sesama,” tambahnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan melalui karya, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Sabang, pimpinan instansi vertikal, jajaran Pemerintah Kota Sabang, pimpinan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta peserta upacara lainnya.[]

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Turnamen DEGE 2026 Bergulir, PS Unaya Tantang Pordela di Laga Pembuka Sore Ini

Oleh Redaksi · 27 Okt, 14.04 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH — PS Unaya Kuta Baro akan menghadapi Pordela Pulo Aceh pada laga pembuka Turnamen Sepak Bola DEGE 2026 di Lapangan PSKB Kuta Breuh, Gampong Cot Preh Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Selasa sore, 27 Oktober 2026.

Turnamen ini diikuti 16 tim dari sejumlah daerah yang akan bersaing memperebutkan total hadiah Rp62 juta. Ajang tersebut diharapkan menjadi ruang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus mempererat hubungan antartim.

Owner DEGE, Nasri Dege, mengatakan seluruh tim peserta telah menyatakan kesiapan mengi-

kuti turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi berlangsung lancar dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

“Semoga seluruh pertandingan berlangsung lancar, sportif, dan mampu menjadi hiburan bagi masyarakat,” ujar Nasri, Senin, 26 Oktober 2026.

Sebanyak 16 tim yang ambil bagian dalam turnamen ini adalah PS Unaya Kuta Baro, PSKD Kajhu, Persima Meunasah Krueng, Pordela Pulo Aceh, Lamseunong FC, Carlos Lhoknga, Lhokdawoeut FC Lamteuba, dan Andela Lambro Deyah Kuta Baro. Delapan tim lainnya yakni Puspa Payong Baet Baitussalam,

Sinar Sukma 80 Sibreh, PSMT Meunasah Tuha, PSPI Indrapuri, Krueng Raya FC, Persimal Malahayati Krueng Raya, Rungkhoem FC Lam Alu Cut Kuta Baro, dan Amla Academy.

Turnamen DEGE 2026 dijadwalkan dibuka oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muthi. Ketua panitia, Fajar, mengajak seluruh tim menjaga sportivitas dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan selama kompetisi berlangsung.

“Melalui turnamen ini kami berharap silaturahmi antartim semakin erat sehingga seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses
ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.
 Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
 Markas Besar TNI Angkatan Darat,
 Jakarta Pusat,
 pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
 selalu mendapat rahmat dan petunjuk
 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
 Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
 Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

www.bankaceh.co.id

ACEH

Dari Anggaran Rp18 Miliar, BNNP Aceh Hanya Punya Rp1 Miliar untuk Berantas Narkoba

Oleh Redaksi · 28 Okt, 19.28 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Anggaran terbatas membuat ruang gerak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam memberantas peredaran narkotika masih terkendala. Dari total anggaran Rp18 miliar yang tersedia pada 2026, hanya sekitar Rp1 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan narkoba di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani dalam kegiatan silaturahmi bersama wartawan di Rabu (28/10/2026).

Ia mengatakan, sekitar Rp16 miliar dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai. Sementara itu, anggaran yang tersisa harus dibagi untuk kebutu-

han operasional dan kegiatan pemberantasan narkotika.

“Pada 2026, BNNP Aceh memperoleh anggaran Rp18 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai. Dengan demikian, anggaran yang tersedia untuk kebutuhan lainnya sangat terbatas,” kata Dedy dalam kegiatan silaturahmi bersama wartawan di Rabu, 28 Oktober 2026.

Dedy menjelaskan, dari sisa anggaran sekitar Rp2 miliar, separuhnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor, seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas. Adapun Rp1 miliar lainnya dialokasikan untuk kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga penindakan narkotika.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi salah satu tantangan bagi BNNP Aceh dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika. Meski demikian, lembaga itu tetap melakukan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba.

Sepanjang 2026, BNNP Aceh telah melakukan lima kali penindakan. Namun, hanya dua kegiatan yang dibiayai oleh negara, sedangkan tiga lainnya menggunakan biaya sendiri.

“Sepanjang 2026, kami telah melakukan lima kali penindakan. Dua kegiatan dibiayai oleh negara, sementara tiga lainnya kami tanggung dengan biaya sendiri,” ujar Dedy.

Ia mengatakan, pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan masyarakat. Menurut dia, upaya tersebut tidak dapat sepe-

nuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum karena pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

“Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Aceh. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata dia.

Komisi III DPR RI Dorong Penguatan Anggaran

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. T. Ibrahim, ST, MM, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi BNNP Aceh.

ACEH

BPJS Kesehatan Jelaskan Cara Mengaktifkan Kembali PBI JK

Oleh Aceh Barat · 28 Okt, 16.51 WIB



BPJS Kesehatan mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) rutin mengecek status kepesertaan JKN. FOTO/ist

JAKARTA – BPJS Kesehatan mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk rutin mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Imbauan ini menyusul penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizcky Anugerah, menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria kesejahteraan desil 1–5 tidak termasuk dalam sasaran penerima PBI JK.

“Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya. Jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar Rizcky, Rabu (28/10/26).

Peserta yang tercatat dalam desil 6–10, tetapi kondisi ekonominya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data melalui kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat. Peserta diberikan waktu 90 hari untuk memperbarui data sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Pengecekan data bantuan sosial juga dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial di <https://cekbanos.kemensos.go.id/>.

Sementara itu, peserta yang kondisi ekonominya sudah sesuai dengan data atau telah mampu membayar iuran secara mandiri diimbau beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri agar perlin-

dungan kesehatannya tetap terjaga.

Peserta Nonaktif Bisa Ajukan Reaktivasi

BPJS Kesehatan menyebut peserta PBI JK yang dinonaktifkan masih berpeluang mengajukan reaktivasi sesuai ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, mekanisme ini mencakup peserta yang dinonaktifkan dalam jangka waktu paling lama enam bulan serta peserta nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk mengajukan reaktivasi, peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Dinas Sosial selanjutnya mengusulkan reaktivasi kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi.

Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan sehingga peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau peserta PBI JK yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat,” kata Rizcky.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN

Peserta dapat memeriksa status aktif atau nonaktif kepesertaan JKN melalui sejumlah kanal resmi berikut:

- PASTI JKN: <https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/>
- Aplikasi Mobile JKN
- PANDAWA: 0811-8165-165
- BPJS Kesehatan Care Center 165
- Kantor BPJS Kesehatan terdekat

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

BBPOM Aceh Dorong Layanan MPP Aceh Besar yang Responsif dan Berkualitas

Oleh Redaksi · 27 Okt, 18.50 WIB

ACEH BESAR – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, Selasa (27/10/2026), di Ruang Rapat MPP Aceh Besar.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, serta merumuskan langkah perbaikan agar layanan semakin mudah diakses, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan berbagai instansi yang membuka gerai pelaya-

nyan di MPP Aceh Besar, termasuk BBPOM Aceh.

Melalui forum ini, setiap instansi berkesempatan menyampaikan evaluasi pelaksanaan layanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas, serta memperkuat koordinasi demi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar, Andria Shahputra, menegaskan bahwa seluruh petugas gerai harus berkomitmen memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Kedisiplinan dalam memenuhi jadwal operasional serta kesiapan menindaklanjuti pengaduan dan

keluhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

“Pelayanan publik yang diberikan harus dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan, serta dapat segera menindaklanjuti pengaduan ataupun keluhan dari masyarakat,” ujar Andria.

Penegasan tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh kesiapan petugas, kejelasan informasi, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, Ketua Tim Pelayanan Publik BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, menyam-

paikan komitmen BBPOM Aceh untuk terus menghadirkan layanan yang informatif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi dengan pengelola MPP Aceh Besar dan instansi terkait, terutama dalam memperluas akses informasi mengenai keamanan obat dan makanan serta memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses registrasi produk sesuai ketentuan.

“Petugas layanan BBPOM Aceh siap memberikan layanan kepada masyarakat dan UMKM yang memerlukan informasi dan pendampingan terkait ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Stafsus Gubernur Aceh Nektu Bahas Progres Pemulihan Lahan Pertanian dengan Plt Kadistanbun

Oleh Redaksi · 27 Okt, 19.35 WIB

BANDA ACEH – Staf Khusus Gubernur Aceh, Junaidi (Nektu), bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, Senin (26/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Nektu menyampaikan sejumlah masukan dari petani terkait pemulihan sawah dan kebun yang dinilai masih perlu dipercepat.

Nektu hadir mendampingi kelompok tani dari Subulussalam. Ia menekankan pentingnya mempercepat pekerjaan di lapangan sebelum intensitas hujan meningkat dan waktu pelaksanaan semakin terbatas menjelang akhir tahun.

“Masih ada sawah yang belum tertangani maksimal, terutama yang rusak berat. Jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung juga perlu perhatian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Aceh Barat Perkuat Tata Kelola Data Lewat Portal SATURASI

Oleh Aceh Barat · 28 Okt, 17.04 WIB



Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, membuka kegiatan Coaching Clinic Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2026 di Aula Diskominsa Aceh Barat.FOTO/ist

MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) menggelar coaching clinic penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti pengelola data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, di Aula Diskominsa, Selasa (27/10/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominsa Dedy Jefernal, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Fachmi Suci-hairi, serta Tim Koordinasi dan Asistensi Bupati (TKAB), Afrizal Abdul Rasyid.

Dedi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan dan pemanfaatannya.

Menurut dia, penguatan Satu Data Indonesia membutuhkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta penyusunan anggaran daerah.

“Muara dari seluruh proses penyelenggaraan Satu Data adalah tersedianya data yang dapat dipercaya dan digunakan bersama,” ujar Dedi.

Ia menegaskan, Satu Data Indonesia bukan sekadar membangun

portal digital, melainkan membentuk ekosistem tata kelola data yang terintegrasi. Dengan demikian, instansi pemerintah maupun masyarakat dapat mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus berulang kali mengajukan permintaan kepada perangkat daerah.

Dedi menjelaskan, kemudahan tersebut hanya dapat terwujud apabila data dalam portal selalu diperbarui, lengkap, dan sesuai standar. Selain mempercepat pertukaran informasi, sistem tersebut diharapkan mengurangi beban administrasi serta menghemat waktu dan biaya.

Dalam kegiatan itu, Diskominsa juga memberikan pendampingan tata kelola portal Satu Data Kabupaten Aceh Barat melalui transformasi Portal Open Data Aceh Barat dari domain

data.acehbaratkab.go.id menjadi portal baru SATURASI (Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri) di satudata.acehbaratkab.go.id.

Melalui portal tersebut, pemerintah daerah menargetkan tersedianya satu rujukan data yang terintegrasi. Perangkat daerah juga didorong menata kembali data sektoral, menyesuaikan metadata dan standar data, serta meningkatkan konsistensi pembaruan informasi.

Pemkab Aceh Barat berharap penguatan Satu Data Indonesia dan optimalisasi Portal SATURASI dapat mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses informasi bagi pemerintah dan masyarakat.[]

Editor : Biro Meulaboh.

EDUKASI

Titik Nol Kreativitas USK: Di Bawah Rindang Pohon Panggung Tanpa Nama, Antara Jejak Ulama dan Asa Mahasiswa

Oleh Syarifudin Brutu · 27 Okt, 20.04 WIB

ANYAKAN kepada siapa saja di Universitas Syiah Kuala (USK) tentang tempat nongkrong atau lokasi latihan paling legendaris, dan jawabannya sering kali keluar begitu saja tanpa perlu pikir panjang: “Belakang AAC aja.” Tidak ada pin peta digital yang diperlukan. Tidak ada instruksi rumit yang harus dijelaskan.

Letaknya sangat strategis namun bersahaja. Persis diapit oleh gedung AAC Dayan Dawod, kantin utama, deretan ATM, BSI KCP USK, hingga USK store. Siang hari, area berpagar rapi ini berfungsi ganda sebagai tempat berteduh sekaligus kantin terbuka. Mahasiswa lalu-lalang menyantap makan siang di bawah teriknya matahari Banda Aceh, sementara angin menyapu dedaunan rindang.

Namun, begitu jarum jam menunjuk pukul empat sore, suasana bergeser total.

Meja-meja makan berangsur kosong. Panggung terbuka di tengah naungan pohon besar itu mendadak hidup. Dari ruang publik biasa, tempat ini berubah menjadi panggung kreatif tanpa nama—jantung tersembunyi tempat denyut seni mahasiswa USK berdetak dari masa ke masa.

Ada pemandangan kontras yang justru menghidupkan tempat ini. Tepat di bawah naungan ranting-ranting pohon besar tersebut, berdiri sebuah kompleks makam kecil berpagar. Sebuah prasasti mencatat dengan jelas kalimat penuh sejarah: “Di tempat ini disemayamkan para ulama yang menyebarkan Islam di Aceh Besar.”

Tertulis lima nama ulama sepuh yang bersemayam di sana: H. Achmad Qasturi (1316–1389), Tgk. Malem Panyang (1337–1339), Datok Nafi, Muda Selangor, dan Abu Said. Di sinilah

letak magisnya. Hanya berjarak beberapa meter dari pusara para penyebar agama masa lampau, energi muda kreativitas modern bergolak tanpa henti setiap harinya.

Begitu petang menjelang, pelataran ini riuh oleh berbagai aktivitas seni. Mahasiswa lintas program studi berkumpul melebur tanpa sekat. Ada yang berlatih teater, menghafal naskah drama, merangkai gerak tari tradisional maupun kontemporer, membaca puisi dengan intonasi tajam, hingga menabuh ritme Rapa’i yang meng-gema.

Ketika musim pementasan atau festival besar kampus semakin dekat, kapasitas tempat ini diuji. Panggung utama langsung penuh sesak. Para peserta latihan tumpah ruah hingga ke teras samping Kantin AAC dan sudut-sudut gang gedung.

INTERNASIONAL

Detik-detik Pangeran Arab Tiba di Iran Minta Bantuan Atas Serangan Houthi

Oleh Redaksi · 27 Okt, 11.36 WIB

BANDA ACEH -Terekam detik-detik Pangeran Arab yang juga Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman tiba di Teheran, Iran diduga untuk meminta bantuan atas serangan Houthi.

Ketibaan rombongan kerajaan Saudi di Teheran pada Senin (26/10/2026) diduga terkait diplomasi perang dengan pihak Houthi Yaman.

Sebab diketahui belakangan Houthi yang disebut bersekongkol dengan Iran rutin melakukan serangan ke Arab Saudi khususnya Ibu Kota Riyadh.

Arab Saudi pun sebelumnya sempat meminta Iran agar bisa menjembatani diplomasi dengan Houthi lantaran negara tersebut merupakan sekutu kelompok Houthi.

Dimuat The Jerusalem Post Saudi, Iran, Turki, dan Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan antara negara-negara yang menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Arab ...

ACEH

Irpannusir Desak Evaluasi Izin Dua Tambang Emas Samadua

Oleh Van · 28 Okt, 10.20 WIB



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir. FOTO/Net.

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh didesak meninjau kembali izin dua perusahaan tambang emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, menyusul penolakan masyarakat yang disebut telah memicu konflik antarwarga.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir, meminta pemerintah tidak mengabaikan aspirasi warga dalam menentukan kelanjutan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Desakan itu menempatkan pemerintah daerah pada persoalan yang tak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan perizinan investasi. Ketika penolakan masyarakat beriringan dengan ketegangan sosial, evaluasi terhadap izin, proses pelibatan warga, serta potensi dampak kegiatan tambang perlu mendapat perhatian serius.

Irpannusir menegaskan, perusahaan yang ditolak masyarakat tidak semestinya menjalankan kegiatan pertambangan sebelum persoalan yang memicu penolakan tersebut diselesaikan.

“Sekiranya ini ditolak oleh warga, perusahaan tersebut tidak boleh beroperasi di Samadua,” kata Irpannusir di Banda Aceh, Selasa, 27 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, persoalan itu mencuat setelah dirinya menerima informasi mengenai penolakan warga ketika melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya keberatan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tambang emas di wilayah mereka.

Irpannusir juga mengungkapkan bahwa persoalan pertambangan itu sempat memicu bentrokan di antara warga. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan respons

pemerintah agar perbedaan sikap mengenai kegiatan tambang tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

“Ada dua perusahaan tambang yang ditolak kehadirannya di Kecamatan Samadua. Bahkan sempat menimbulkan konflik baku hantam di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dua Perusahaan Menguasai Wilayah Izin Hampir 1.500 Hektare

Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh yang dikutip dalam pemberitaan, terdapat dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di Kecamatan Samadua.

Perusahaan pertama, PT Mineral Mega Sentosa, tercatat memiliki wilayah izin seluas 739 hektare. Izin tersebut tercantum dalam IUP Nomor 540/DPMTSP/1272/IUP-EKS./2025 yang diterbitkan pada 19 November 2025.

Sementara itu, PT Bersama Sukses Mining memiliki wilayah izin seluas 752,4 hektare berdasarkan IUP Nomor 545/DPMTSP/882/IUP-EKS/2024 yang diterbitkan pada 17 Juli 2024.

Jika kedua wilayah izin tersebut dijumlahkan, luasnya mencapai 1.491,4 hektare. Besaran konsesi itu membuat evaluasi terhadap aspek perizinan, tata kelola lingkungan, dan hubungan perusahaan dengan masyarakat menjadi penting untuk diperiksa secara menyeluruh.

Meski demikian, luas wilayah izin tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kerusakan lingkungan ataupun pelanggaran hukum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Fasilitas Mewah di Lapas Bukan Hanya Masalah Perizinan

Oleh Ria Nurvika · 27 Okt, 15.00 WIB

Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H

MBUSMAN RI menemukan bangunan dengan fasilitas mewah di dekat rumah dinas Kepala Lapas Kelas II A Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9).

Syafrida Rachmawati Rasahan menyampaikan bahwa rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti televisi

berukuran besar, pendingin ruangan, dan alat kebugaran.

Lebih fantastis lagi di dalam ruangan tersebut ditemukan minuman keras.

Fasilitas mewah ini dapat ditempati oleh warga binaan dengan mengeluarkan sejumlah uang.

Lebih jauh lagi ditemukan kawasan rumah mewah tersebut tidak memiliki pagar permanen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ANEKA BERITA

14 BERITA

LIFESTYLE

Pernikahan Jokowi hingga Kelahiran Gibran Janggal, Peneliti Dokumen Jabarkan Jarak Waktu yang Aneh

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.04 WIB



Kolase dan Tangkapan Layar 30 Tahun Pernikahan Jokowi dan Iriana. FOTO/Kolase.

BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) palsu dengan tingkat keyakinan 99,98 persen. Ia mendasarkan penilaian itu pada dua hal, yaitu karena tak pernah ditunjukkan ke publik dan kronologi janggal dalam video kampanye “Cerita Hidup Jokowi”. Pernyataan ini disampaikan Luke Susilo dalam obrolan bersama Refly Harun yang tayang di channel YouTube REFLY HARUN PODCAST pada 27 Oktober 2026. “Apakah Anda yakin ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Kalau yakin asli berapa persen keyakinannya? Kalau yakin palsu berapa

persen keyakinannya?” tanya Refly. Luke menjawab, “Kalau soal ijazahnya sejauh ini saya yakin 100% palsu. Ya udah 99, 98 aja,” ujarnya. “UGM mengatakan asli, Labfor mengatakan asli, teman-teman mengatakan asli, tapi barang yang asli itu yang mana? Kan enggak pernah ditunjukkan,” tambahnya. Refly menyebut pernah melihat dokumen itu bersama sejumlah orang. “Kita geruduk ramai-ramai satu dokumen, kita lihat ada beberapa kepala di situ kan,” kata Refly. Alasan kedua berkaitan dengan video “Cerita Hidup Jokowi” yang diunggah 12 April 2019, lima hari sebelum pemilihan presiden.

Luke menilai video itu dipersiapkan serius. “Ini kan betul-betul video yang sangat dipersiapkan dengan luar biasa,” katanya. Narasi dalam video itu, yang diputar dan dibacakan dalam diskusi, berbunyi: “Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh.” Narasi berlanjut: “Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama dua setengah tahun. Pada tahun kedua Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo.” Luke membandingkannya dengan dokumen yang ia sebut, yaitu tanggal lulus 5 November

1985, pernikahan 24 Desember 1986 pada fotokopi buku nikah, dan kelahiran Gibran 1 Oktober 1987. “Itu ada jarak 9 bulan 9 hari dengan kelahiran Gibran pada tanggal 1 Oktober 1987,” ujarnya. “Yang bermasalah itu ketika ada cerita dua setengah tahun.” Dari simulasi itu, Luke menyimpulkan bahwa video tersebut tak sejalan dengan tanggal kelulusan pada ijazah. “Justru video ini sebenarnya adalah pengakuan bahwa terlepas dia betul lulus atau tidak lulusnya itu... walaupun lulus bukan di 5 November 85,” kata Luke.



NASIONAL

Kiai NU Usulkan Abolisi untuk Gus Yaqut, KPK Pilih Fokus ke Pembuktian

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.19 WIB

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah fokus pada pembuktian dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Pernyataan itu disampaikan usai munculnya usulan dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama (NU) agar Yaqut mendapatkan abolisi. Usulan abolisi untuk Yaqut datang dari para kiai NU saat berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, Rabu (21/10). Dalam pertemuan itu, hadir juga kakak kandung dari Yaqut yang juga mantan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang

sedang berjalan dalam perkara Yaqut dkk. Ia menegaskan, saat ini perhatian publik sebaiknya diarahkan pada proses pembuktian perkara di persidangan. Menurut Budi, keterangan para saksi menjadi bagian penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan kuota haji tambahan. “Yang pertama, KPK tentu mengajak dan mengimbau untuk kita fokus dulu kepada proses pembuktian yang sedang berjalan di persidangan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/10). Budi menjelaskan, persidangan kuota haji tambahan masih berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,

dengan menghadirkan sejumlah saksi yang dimintai keterangan oleh majelis hakim. Kesaksian tersebut diperlukan untuk membantu menguraikan rangkaian peristiwa serta menjelaskan konstruksi perkara secara utuh. “Proses pembuktian masih berlangsung, beberapa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan guna membantu menerangkan kepada majelis hakim bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini,” ujarnya. Dalam persidangan, sejumlah saksi dari lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) telah memaparkan proses pengambilan keputusan terkait pembagian kuota haji tambahan. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pembagian kuota

haji karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Budi mengatakan, berdasarkan ketentuan, seharusnya kuota haji tambahan dibagi dengan komposisi 92 persen untuk jamaah haji reguler dan 8 persen untuk jamaah haji khusus. Namun, pembagian yang dilakukan justru menggunakan perbandingan 50 persen untuk masing-masing kategori. Selain memeriksa saksi dari Kemenag, persidangan juga menghadirkan pihak-pihak yang mengetahui proses awal pemberian kuota haji tambahan.

OPINI

Bank Aceh Selangkah Lagi Menuju Bank Devisa

Oleh Redaksi · 28 Okt, 06.30 WIB



Oleh: Khalil Ismail ((Direktur Kepatuhan Bank Aceh Periode 2006 - 2010)) UDAH merupakan kodrat atau menjadi hukum alam, bahwa dalam kehidupan di dunia ini, segala sesuatu selalu dimulai dari yang kecil, dalam perjalanan waktu tumbuh menjadi besar. Contoh sehari-hari, seperti proses kehidupan manusia. Pada saat lahir masih disebut bayi, selanjutnya tumbuh menjadi manusia dewasa. Demikian juga dengan makhluk lainnya. Perumpamaan ini juga berlaku untuk sebuah usaha di bidang jasa lainnya, seperti perdagangan dan perbankan, seperti Bank Aceh.

Bank Aceh yang didirikan pada tanggal 1 April 1958 dengan Akta Nomor 1 yang dibuat di hadapan Mula Pangihutan, Wakil Notaris di Banda Aceh, yang berbentuk Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap), dengan nama Bank Kesejahteraan Aceh NV, disingkat dengan Bank BKA, dengan modal dasar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Adapun maksud dan tujuan pendirian Bank BKA adalah menjalankan segala pekerjaan Bank dalam arti seluas-luasnya, dengan titik berat tugas, antara lain menyelenggarakan bidang perkreditan, menerima simpanan uang (giro, deposito, dan lain-lain), memperdagangkan Surat-surat berharga, melakukan usaha lain yang lazim bagi suatu Bank, yang tidak bertentangan dengan Undang - Undang negara.

Pada pokoknya, tugas bank di titik beratkan dan didasari pada cita-cita memberikan bantuan bagi Usaha-usaha masyarakat, terutama dalam bidang perindustrian, pertanian, perdagangan dan Usaha-usaha lain yang mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh. Tulisan singkat ini bertujuan untuk memberi gambaran dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna jasa Bank Aceh tentang Bank Devisa. Sedangkan kepada Bank Aceh, apa saja yang perlu dilakukan dan dipersiapkan, serta untuk mengetahui sejauh mana sudah persiapan dan kesiapan Bank Aceh dalam menyongsong kenaikan “kelas” menjadi Bank Devisa. Sebagai pendukung untuk Bahan-bahan tulisan ini, diambil dari beberapa sumber, baik dari literatur, artikel, maupun data-data pendukung lainnya.

Peran Bank Devisa Di Indonesia Indonesia sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara, telah menjadi pusat perhatian di tingkat global. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan telah mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di wilayah ini. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, namun Bank Devisa di Indonesia tetap bisa memainkan peran yang signifikan dalam memastikan stabilitas ekonomi negara ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Disorot Dugaan Nepotisme, Akhirnya Dua Anak Menhaj Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli

Oleh Redaksi · 27 Okt, 09.10 WIB

BANDA ACEH - Dua anak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mundur dari jabatan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini diambil setelah pengangkatan keduanya menuai kritik publik dan dikaitkan dengan dugaan nepotisme.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, surat pengunduran diri keduanya telah diterima oleh pimpinan kementerian pada Senin (26/10/2026). "Saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



HIBURAN

Richard Lee Siap Bersaksi di Sidang Lawan Doktif, Kuasa Hukum: Ini yang Ditunggu

Oleh Redaksi · 28 Okt, 08.36 WIB



BANDA ACEH - Dokter Richard Lee bersiap menghadapi agenda pemeriksaan terdakwa dalam sidang lanjutan kasus hukum yang melibatkan dirinya dan Dokter Detektif (Doktif). Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis (29/10/2026).

Kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafied, mengatakan kliennya siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Pihaknya menilai agenda tersebut menjadi kesempatan penting untuk menjelaskan perkara berdasarkan fakta hukum yang mereka miliki.

Faizal menyebut pemeriksaan terdakwa merupakan momen yang telah dinantikan tim kuasa hukum Richard Lee. Mereka berencana

menyampaikan keterangan yang dinilai dapat memperjelas duduk perkara dalam persidangan.

"Ini paling ditunggu-tunggu. Jadi besok kesempatan beliau untuk menjelaskan duduk perkara sebagaimana fakta-fakta hukum yang memang terjadi sebenarnya. Besok ini kita akan mengungkapkan kebenaran dan fakta-fakta hukum yang akan menjadi fakta persidangan," ujar Faizal saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dia menambahkan, tim kuasa hukum telah mempersiapkan Richard Lee untuk menghadapi berbagai pertanyaan dari majelis hakim maupun JPU. Pemeriksaan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Richard untuk menyampai-

kan pembelaan atas tuduhan yang dilaayangkan kepadanya.

"Besok adalah momen terbaik untuk Dokter Richard memberikan pembelaan diri terbaik terhadap apa yang dituduhkan oleh Doktif. Jadi akan kita sampaikan kebenaran real-nya, kebenaran materiilnya bahwa memang Dokter Richard tidak ada di tanggal-tanggal yang dituduhkan terjadinya peristiwa pidana," kata Faizal.

Menurut Faizal, pihaknya akan memaparkan bukti-bukti yang diklaim menunjukkan Richard Lee tidak melakukan tindak pidana pada tanggal-tanggal yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Tanggal yang dimaksud yakni 12 Oktober, 23 Oktober, dan 2 November.

Faizal juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah hukum lanjutan apabila Richard Lee nantinya diputus bebas oleh pengadilan. Langkah tersebut dapat berupa gugatan pidana maupun perdata.

"Tunggu saja nanti hari Kamis, sebentar lagi kan. Kalau nanti diputus bebas, Dokter Richard punya hak untuk melakukan gugatan balik, baik pidana maupun perdata. Kami sebagai tim advokasi siap menjalankan apa pun yang diinstruksikan oleh klien," kata Faizal.

Meski demikian, proses persidangan masih berjalan. Keterangan Richard Lee dalam agenda pemeriksaan terdakwa akan menjadi bagian dari fakta yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

SPORT

Mengapa Liga Inggris Selalu Menarik Perhatian? Ini Faktor di Balik Popularitas Premier League

Oleh Redaksi · 28 Okt, 20.39 WIB



BANDA ACEH - Setiap akhir pekan, jutaan pasang mata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tertuju pada pertandingan Premier League.

Liga Inggris telah lama dianggap sebagai salah satu kompetisi sepak bola paling populer dan paling banyak ditonton. Apa saja faktor yang membuatnya begitu menarik? Berikut ulasannya.

Persaingan Ketat dan Sulit Ditebak

Salah satu daya tarik terbesar Premier League adalah tingkat persaingannya. Tim papan atas, tengah, hingga bawah sering saling mengalahkan sehingga hasil pertandingan sulit diprediksi. Kejutan seperti tim promosi yang menumbangkan klub besar atau perebutan gelar yang baru selesai di pekan terakhir membuat setiap laga terasa penting.

Intensitas dan Gaya Permainan yang Atraktif

Liga Inggris dikenal dengan tempo cepat, duel fisik, serta semangat bertarung hingga menit akhir. Meski kini banyak klub mengadopsi pendekatan taktik modern yang lebih teknikal, nuansa intens tetap menjadi ciri khas yang disukai penonton. Pertandingan yang jarang membosankan membuat liga ini selalu menghadirkan hiburan.

Kehadiran Bintang dan Pelatih Kelas Dunia

Premier League menjadi magnet bagi pemain dan pelatih terbaik dari berbagai negara. Keberagaman ini menghadirkan perpaduan gaya bermain yang kaya sekaligus cerita menarik di setiap klub. Pemain muda berba-

kat juga mendapat panggung besar untuk menunjukkan kualitasnya.

Sejarah, Rivalitas, dan Budaya Sepak Bola

Kekuatan sejarah klub-klub Inggris tidak bisa diabaikan. Derbi seperti Manchester United melawan Liverpool, derbi London Utara, atau derbi Manchester menghadirkan emosi yang melampaui urusan poin. Atmosfer stadion, nyanyian suporter, dan tradisi panjang membentuk budaya sepak bola yang khas.

Akses Informasi dan Komunitas Penggemar

Popularitas liga juga ditopang oleh ketersediaan informasi yang melimpah, mulai dari statistik, analisis taktik, berita transfer, hingga diskusi komunitas. Bagi penggemar yang ingin menelusuri referensi lain seputar dunia bola dapat menjadi salah satu situs yang dikunjungi sebagai bahan perbandingan dengan sumber-sumber lainnya. Tentu saja, pastikan selalu memilih sumber informasi yang kredibel dan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah Anda.

Siaran Global dan Daya Tarik Komersial

Premier League memiliki jangkauan siaran ke ratusan negara dengan kualitas produksi yang tinggi. Nilai hak siar yang besar memungkinkan klub berinvestasi pada pemain, pelatih, fasilitas, dan akademi. Siklus ini menjaga kualitas kompetisi sekaligus meningkatkan eksposur secara global.

Kuat di Media Sosial dan Konten Digital

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Bank Aceh

AcTion

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

EDUKASI

Dilepas dengan Pesan Adab, Mahasiswa USK Berangkat Olah Kunyit Jadi Teh Herbal untuk Warga Blang Tingkuem

Oleh Syarifudin Brutu · 28 Okt, 19.58 WIB



16 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) dari berbagai program studi dilepas untuk menjalankan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Blang Tingkuem, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Pelepasan digelar di Ruang MIPA A 01.03, Fakultas MIPA USK, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026), pukul 16.00 hingga sekitar 18.00 WIB. FOTO/Dok. Fakultas MIPA.

BANDA ACEH – Sebanyak 16 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) dari berbagai program studi dilepas untuk menjalankan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Blang Tingkuem, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Pelepasan digelar di Ruang MIPA A 01.03, Fakultas MIPA USK, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026), pukul 16.00 hingga sekitar 18.00 WIB.

Program tersebut merupakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program Aksara Mahasiswa, DPPM BIMA Tahun 2026, yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikristek). Menguasai judul "Penerapan Teknologi Pengolahan Teh Herbal Berbasis Tumbuhan Obat Lokal untuk Penguatan Kesehatan dan Keman-

dirian Ekonomi Masyarakat Blang Tingkuem", program ini berfokus pada produksi dan pengolahan kunyit menjadi teh herbal bernilai ekonomi.

Kelompok mahasiswa diketuai oleh Syarifudin Brutu dan dibagi menjadi tiga tim, yakni tim produksi, tim edukasi, dan tim kompos.

Tim kompos bertugas mengolah limbah organik sisa produksi. Anggotanya tidak hanya berasal dari rumpun sains seperti biologi, kimia, farmasi, dan pertanian, tetapi juga dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Ilmu Komunikasi, dan beberapa latar keilmuan lainnya.

Penanggung jawab program adalah Prof. Dr. Zumaidar, S.Si., M.Si., guru besar Jurusan Biologi FMIPA USK, yang dibantu sejumlah dosen lain.

Acara dibuka Dr. Dra. Sulastris, M.Si., yang juga anggota tim pengusul program. Ia menjelaskan, kegiatan dirancang secara menyeluruh, mulai dari budi daya hingga pemasaran.

"Kami berfokus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam menggunakan pupuk organik, serta memastikan proses pengolahan produk memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan dampak jangka panjang bagi konsumen," kata Sulastris.

Menurut dia, pendampingan juga mencakup uji kadar air produk, dengan batas maksimal 10 persen untuk mencegah pertumbuhan jamur.

Selain itu, mahasiswa akan membantu warga mengurus izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), menyusun manajemen

usaha, dan memasarkan hasil olahan.

Dalam arahnya, Sulastris mengingatkan peserta agar menjaga etika dan norma masyarakat selama bertugas.

Ia menegaskan, program ini setara dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Ingat, program ini setara dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kalian turun langsung ke tengah masyarakat membawa nama besar USK," ujarnya.

Ia mengutip peribahasa "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" sebagai pegangan bagi mahasiswa.

Di luar proyek utama, mahasiswa juga dianjurkan mengisi logbook dengan kegiatan bersama warga, antara lain menjadi muazin atau imam di meunasah ...

EDUKASI

Bunda PAUD Aceh Perkuat Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini di Gayo Lues

Oleh Redaksi · 28 Okt, 15.06 WIB



Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Mukarramah Fadhlullah. FOTO/Net.

GAYO LUES – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Mukarramah Fadhlullah membuka kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Gayo Lues yang berlangsung di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Gayo Lues, Rita Elviani, serta para Bunda PAUD kecamatan dan gampong sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Dalam kesempatan tersebut, Mukarramah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan kegiatan tersebut.

Apresiasi secara khusus disampaikan kepada para Bunda PAUD kecamatan dan gampong yang telah mengambil peran dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak.

Karena itu, diperlukan perhatian dan keterlibatan bersama agar setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sejak usia dini.

Penguatan Pokja Bunda PAUD juga menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis Bunda PAUD dalam mendorong kepedu-

lian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini.

Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan keluarga, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Mukarramah menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Bunda PAUD di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga gampong.

Koordinasi yang baik di setiap tingkatan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program PAUD serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan menyenangkan bagi anak.

Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini.

Pendidikan tidak hanya berlangsung di satuan PAUD, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Gayo Lues semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, upaya penguatan pendidikan anak usia dini di Aceh diharapkan dapat terus berkembang sehingga semakin banyak anak memperoleh fondasi pendidikan yang berkualitas sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik.[]

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

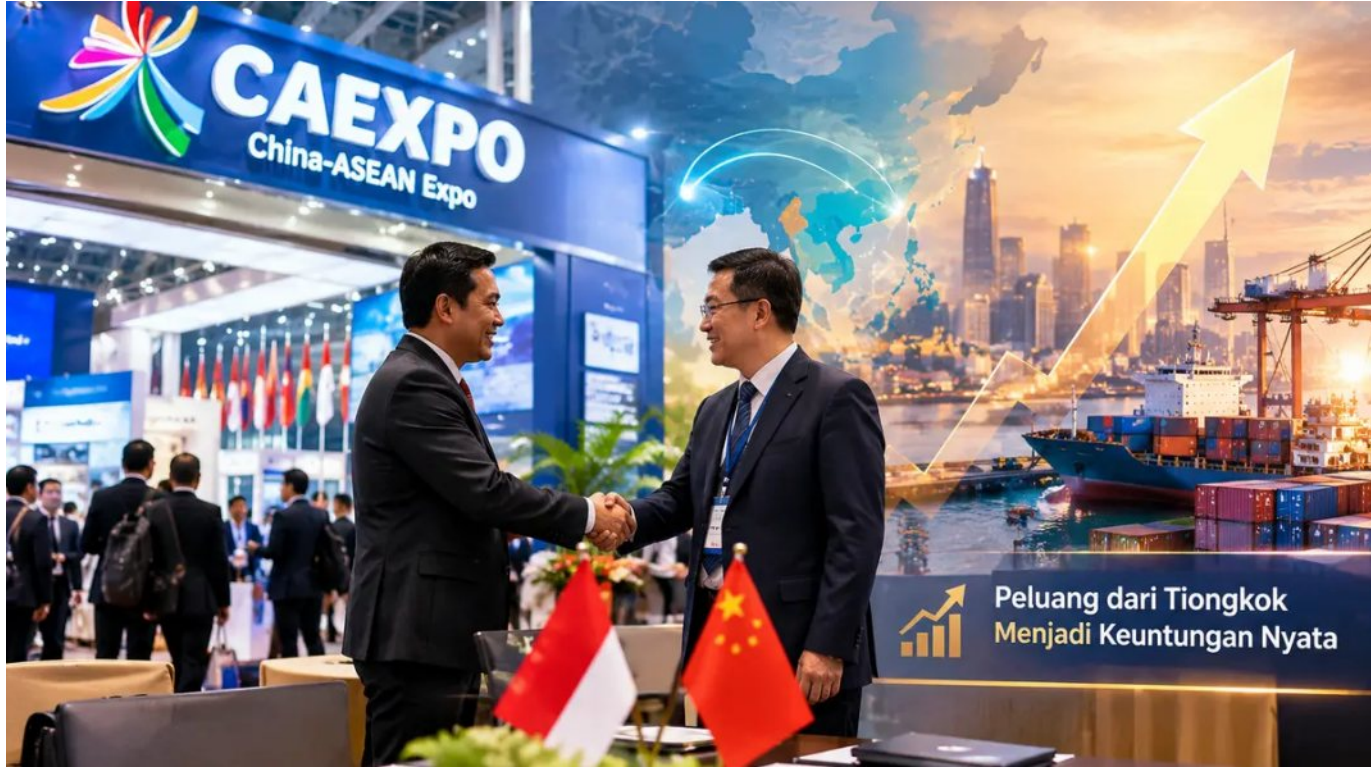
Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

CAEXPO: Perusahaan Indonesia Ubah Peluang dari Tiongkok Menjadi Keuntungan Nyata

Oleh Redaksi · 28 Okt, 10.43 WIB



Pameran China-ASEAN Expo (CAEXPO) menjadi momentum strategis bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas jaringan bisnis, menjajaki kemitraan dengan pelaku usaha Tiongkok, dan membuka peluang perdagangan lintas negara. Melalui pendekatan bisnis yang pragmatis, peluang kerja sama diharapkan dapat dikonversi menjadi keuntungan nyata serta mendorong pertumbuhan

TIONGKOK - Pada 17 September, aroma kopi khas Indonesia berpadu dengan wangi minyak sawit yang menguar dari area pameran Indonesia hingga ke lorong-lorong Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Nanning.

Hari itu merupakan hari pertama penyelenggaraan China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-23. Tahun ini, total area pameran mencapai 170.000 meter persegi, meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 3.400 perusahaan berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di tiga lokasi, yakni Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Nanning, Komunitas Nanning ASEAN (NAN A), dan Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Guilin. Sekitar 50 kegiatan perdagangan dan ekonomi juga

dijadwalkan berlangsung selama pameran.

Tema tahun ini adalah “Berbagi Peluang 3.0, Bersama Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik”. Sekilas, tema tersebut mungkin terdengar seperti slogan resmi pada umumnya. Namun, cukup dengan mengunjungi paviliun Indonesia, pengunjung akan menyadari bahwa pesan tersebut bukan sekadar jargon.

Sebanyak 78 perusahaan Indonesia hadir dalam pameran kali ini, menjadikan Indonesia salah satu negara ASEAN dengan jumlah peserta terbesar. Dengan luas area hampir 2.000 meter persegi, Indonesia berada di jajaran teratas peserta ASEAN bersama Malaysia dan Thailand.

Perusahaan yang hadir pun beragam. Ada Pertamina, perusahaan Indonesia yang masuk dalam

daftar Fortune Global 500; Golden Agri-Resources, salah satu pemimpin industri; PT Wahana Telekomunikasi yang bergerak di bidang komunikasi satelit; serta perusahaan pengolahan minyak sawit, eksportir furnitur, dan produsen makanan serta minuman. Mulai dari komoditas tradisional hingga kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi hijau, berbagai sektor industri Indonesia turut ambil bagian.

Mungkin muncul pertanyaan: mengapa perusahaan Indonesia begitu antusias?

Jawabannya sederhana: karena Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut.

Pada 2025, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Tiongkok telah melampaui 100 miliar dolar AS. Minyak sawit, bijih nikel,

kopi, dan karet dari Indonesia, serta kendaraan listrik, modul fotovoltaik, dan mesin konstruksi dari Tiongkok, telah membentuk hubungan rantai industri yang sangat erat antara kedua negara.

Bagi perusahaan Indonesia, persoalan bukan lagi apakah mereka perlu menghadiri CAEXPO, melainkan bagaimana mereka berpartisipasi dan produk atau teknologi apa yang perlu mereka tampilkan.

Perubahan pada paviliun Indonesia tahun ini menjadi bukti paling jelas.

Dalam beberapa penyelenggaraan sebelumnya, paviliun Indonesia lebih banyak menonjolkan produk konsumsi tradisional seperti kopi, furnitur, dan kerajinan tangan. ...

HIBURAN

Pengacara Richard Lee Balas Keberatan Doktif soal Penangguhan Penahanan: Cobain 7 Bulan Ditahan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 10.05 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menanggapi keberatan Dokter Detektif (Doktif) atas penangguhan penahanan kliennya. Dia bahkan menantang pihak pelapor merasakan sendiri beratnya menjalani penahanan selama tujuh bulan sebelum mempersoalkan keputusan tersebut.

Faizal menilai keberatan yang disampaikan pihak pelapor menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme hukum pidana di Indonesia. Menurutnya, penangguhan penahanan Richard Lee memiliki sejumlah pertimbangan, mulai dari alasan kemanusiaan hingga kondisi kesehatan

"Nah, kalau yang nggak paham hukum memang begitu. Jadi karena kan kita alasannya ini alasan kemanusiaan, biar bisa melaksanakan sidang dari rumah. Lalu alasan kesehatan, biar bisa menjalankan pemulihan kesehatannya dari rumah, rawat jalan. Lalu alasan masa penahanan yang sudah habis," ujar Faizal saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dia menegaskan, menjalani penahanan selama berbulan-bulan bukanlah perkara mudah. Karena itu, pihaknya menilai pengajuan penangguhan penahanan merupakan langkah yang wajar dilakukan untuk memperjuangkan hak kliennya.

"Begitu berat mengalami masa penahanan di dalam. Kalau nggak percaya, yang komplain terus suruh nyobain 7 bulan di dalam. Kira-kira dia minta keluar nggak, minta penangguhan nggak? Jadi

siapa yang nggak setuju diberikan penangguhan, coba deh ngalamin 7 bulan di dalam gantian. Coba sanggup nggak? Pasti siapapun nggak sanggup," kata Faizal.

Lebih lanjut, Faizal menilai perkara yang menjerat Richard Lee tidak menimbulkan dampak fisik maupun kerugian materiil terhadap korban. Hal itu, menurut dia, menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya mengajukan penangguhan penahanan.

"Untuk itu pasti siapapun mau minta ikhtiar, apalagi tidak ada korban, tidak ada yang cacat, tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini," ucapnya.

Faizal juga membantah tuduhan yang mengaitkan penangguhan penahanan Richard Lee dengan dugaan suap. Dia menegaskan, pihaknya telah menjalani seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perlu kami jelaskan ya, kalau kita selalu menjalankan hal-hal yang benar dan yang halal. Jangan nanti balik ke muka sendiri, yang menuduh ternyata itulah yang sering melakukan. Jadi jangan sampai begitu nih, dia tuduh orang begini, dia tuduh, ternyata dialah suhunya yang melakukan hal-hal demikian. Kalau ini ya alhamdulillah ya kita jalani dengan benar, kita jalani sesuai proses," ujarnya.

Menurut Faizal, keputusan majelis hakim tidak mungkin memuaskan semua pihak. Meski demikian, dia memastikan Richard Lee tetap menjalankan kewajibannya ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



EKONOMI

Apa Itu Cloud Mining? Cara Kerja, Biaya, dan Risiko yang Perlu Dipahami

Oleh Redaksi · 28 Okt, 10.38 WIB



Bitcoin menjadi simbol perkembangan aset kripto dan transformasi keuangan digital global. Dengan dukungan teknologi blockchain, Bitcoin menarik perhatian investor dan pelaku industri keuangan di berbagai negara, sekaligus menghadirkan peluang serta risiko di tengah dinamika pasar aset digital. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Cloud mining memungkinkan pengguna menyewa daya komputasi dari penyedia layanan jarak jauh, alih-alih membeli, mengoperasikan, dan memelihara perangkat keras penambangan sendiri.

Penyedia layanan biasanya mengoperasikan peralatan tersebut dan dapat membagikan hasil penambangan berdasarkan ketentuan kontrak.

Model layanan, biaya, dan aturan pembayaran berbeda-beda pada setiap penyedia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami secara tepat layanan apa yang sebenarnya ditawarkan.

Cara Kerja Cloud Mining

Pelanggan memilih paket atau kontrak yang menetapkan sejumlah ketentuan, seperti besaran daya komputasi, durasi kontrak, biaya, dan metode pembayaran.

Penyedia layanan bertanggung jawab mengelola mesin fisik,

pasokan listrik, sistem pendingin, dan pemeliharaan perangkat.

Jika aktivitas penambangan menghasilkan pendapatan, jumlah yang diterima pelanggan dapat bergantung pada tingkat kesulitan jaringan, aset kripto yang ditambang, harga pasar, biaya operasional, serta ketentuan dalam kontrak.

Biaya dan Ketentuan Kontrak yang Perlu Diperiksa

Sebelum membayar kontrak, periksa total biaya, biaya layanan dan pemeliharaan, jangka waktu kontrak, batas minimum penarikan, jadwal pembayaran, serta ketentuan penghentian kontrak lebih awal.

Pastikan juga apakah biaya dapat berubah dan apakah pembayaran yang ditawarkan hanya berupa estimasi atau benar-benar dijamin berdasarkan ketentuan yang jelas.

Penjelasan transparan mengenai hal-hal tersebut jauh lebih bermanfaat daripada klaim promosi tentang potensi keuntungan.

Cara Menilai Penyedia Layanan Cloud Mining

Carilah informasi perusahaan yang dapat diverifikasi, penjelasan yang jelas mengenai lokasi dan cara pengoperasian peralatan penambangan, dokumentasi kontrak yang transparan, serta uraian risiko yang realistis.

Telusuri informasi dari sumber independen dan jangan hanya mengandalkan testimoni, tautan referensi, atau tangkapan layar yang menunjukkan pendapatan.

Berhati-hatilah jika penyedia layanan menghindari pertanyaan mendasar mengenai operasional atau kepemilikan perusahaannya.

Risiko yang Perlu Dipahami Pengguna

Cloud mining bukanlah sumber pendapatan yang terjamin. Penda-

patan dari penambangan dapat menurun ketika tingkat kesulitan jaringan meningkat, harga aset kripto turun, atau biaya operasional bertambah.

Pelanggan juga dapat menghadapi risiko pihak lawan (counterparty risk), ketentuan kontrak yang tidak jelas, pembatasan penarikan dana, atau kehilangan uang apabila penyedia layanan mengalami kegagalan usaha maupun melakukan penipuan.

Janji keuntungan harian tetap dengan nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar, serta tekanan agar pengguna segera menyetorkan dana, merupakan tanda peringatan penting yang perlu diwaspadai.

Daftar Pemeriksaan Praktis Sebelum Menggunakan Cloud Mining

LINGKUNGAN

Filipina Membiarkan Kapal Perang “Sierra Madre” Menghancurkan Ekologi Laut Laut China Selatan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 10.45 WIB



Baru-baru ini, dengan persetujuan Tiongkok, Filipina mengirimkan kebutuhan hidup ke kapal perang "Sierra Madre" yang secara ilegal "terdampar" di Terumbu Ayungin (Second Thomas Shoal) di Laut China Selatan. Setelah itu, juru bicara militer Filipina, Trinidad, menyangkal bahwa tindakan pasokan tersebut dilakukan di bawah persetujuan dan pengawasan Tiongkok, dengan menyatakan "menjalankan misi sendiri tidak memerlukan izin atau persetujuan dari kekuatan asing mana pun". Namun, dari video pasokan di lokasi yang dirilis oleh China Military Bugle, media resmi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, dapat terlihat dengan jelas rekaman pengawasan penuh dari pihak Tiongkok terhadap aktivitas pasokan Filipina.

Sebenarnya, Filipina seharusnya lebih memperhatikan masalah serius kerusakan ekologi laut Laut China Selatan yang disebabkan oleh kapal perang "Sierra Madre", bukan masalah pasokan. Sejak Mei 1999, Filipina dengan alasan "kebocoran lambung kapal, darurat menghindari bahaya, kerusakan teknis" dan sebagainya, membiarkan kapal perang "Sierra Madre" terdampar di terumbu Terumbu Ayungin, dan berjanji akan menariknya kembali setelah diperbaiki. Hingga kini telah berlalu 27 tahun, Filipina terus menunda penarikan kapal perang tersebut dengan berbagai alasan.

Badan kapal sudah berkarat dan rusak parah; cat yang terkelupas dan logam berat yang terlepas (seperti merkuri, tembaga, seng) serta polutan minyak menyebabkan kadar polutan di perairan sekitarnya melebihi standar. Perairan di sekitar dasar kapal mengalami pemutihan yang parah. Zat beracun menimbulkan bahaya jangka panjang bagi terumbu karang dan organisme laut lainnya, menyebabkan tingkat tutupan karang di sekitar kapal dalam radius 400 meter turun hingga 87,3%.

Selain polusi yang disebabkan oleh badan kapal, masalah polusi lingkungan laut oleh lebih dari sepuluh personel marinir yang bertugas di kapal perang tersebut juga sama seriusnya. Baru-baru ini, ketika formasi kapal Dong'an dari Penjaga Pantai Tiongkok melakukan patroli penegakan hukum di perairan sekitar "Sierra Madre" yang "terdampar" secara ilegal di Terumbu Ayungin, ditemukan banyak sampah mengapung di permukaan laut, termasuk drum minyak besar, botol plastik, kertas pembungkus, tali kabel bekas, dan berbagai sampah lain yang dibuang sembarangan ke laut oleh personel yang tinggal di kapal perang Filipina. Penjaga Pantai Tiongkok telah mengerahkan beberapa sekoci untuk melakukan penyelamatan dan pembersihan guna menjaga lingkungan laut Laut China Selatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Kemenhaj Minta Jemaah Umrah Pilih Penerbangan Direct, Netizen: Tiketnya Mahal, Pak!

Oleh Redaksi · 28 Okt, 08.51 WIB



BANDA ACEH - Kemenhaj mengimbau jemaah umrah terbang langsung ke Arab Saudi tanpa transit di Singapura dan Malaysia. Namun, netizen justru menyoroti harga tiket yang mahal.

Imbauan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar jemaah umrah memilih penerbangan langsung menuju Arab Saudi menuai sorotan di media sosial.

Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah menyarankan jemaah menghindari penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia.

Namun, warganet justru menyoroti persoalan yang tak kalah penting: harga tiket pesawat yang dinilai lebih mahal.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan tersebut melalui akun Instagram Kement-

rian Haji pada Selasa (27/10/2026).

Ia meminta calon jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah mempertimbangkan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah.

"Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit (Singapura dan Malaysia). Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi, kami sarankan itu," ujar Dahnil.

Kemenhaj juga memastikan kondisi jemaah umrah di Arab Saudi tetap aman.

Situasi di Makkah dan Madinah dilaporkan kondusif meski eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat.

Namun, imbauan tersebut memancing beragam tanggapan.

Sejumlah warganet mempertanyakan pilihan rute yang disarankan pemerintah, terutama karena penerbangan langsung belum tentu menjadi pilihan paling murah bagi calon jemaah.

Salah satu komentar datang dari akun Instagram @toriqmuhammad yang mengingatkan bahwa penerbangan transit terkadang menawarkan harga lebih terjangkau dibandingkan penerbangan langsung.

"Lebih murah transit, Pak, kadang," tulis akun tersebut.

Komentar itu menyoroti dilema calon jemaah umrah.

Mereka perlu mempertimbangkan keamanan perjalanan, tetapi pada saat bersamaan juga harus menghitung anggaran agar biaya ibadah tidak membengkak.

Keluhan serupa disampaikan akun @chamomile.4me.

Warganet tersebut meminta Dahnil berkoordinasi dengan Garuda Indonesia agar harga penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah bisa lebih terjangkau.

"Segera koordinasi juga dong, Pak Dahnil, dengan Garuda Indonesia kalau harga tiket juga bisa Rp10–15 juta saja dari CGK-Jed, semua jemaah pasti langsung happy bisa direct sampai Jeddah," tulis akun itu.

Akun tersebut menyebut harapan harga tiket berada di kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta, dibandingkan harga sekitar Rp20 juta yang disebutkan.

Harga tiket pesawat sendiri dapat berbeda bergantung pada tanggal keberangkatan, maskapai, ketersediaan kursi, dan kelas penerbangan.

MIGAS

Daftar Harga BBM Pertamina 28 Oktober 2026, Ada yang Naik?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 08.31 WIB



BANDA ACEH - Daftar harga BBM Pertamina hari ini, Rabu (28/10/2026). Pertamina belum menyesuaikan harga terbaru BBM nonsubsidi untuk Oktober 2026.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan harga BBM nonsubsidi masih sama seperti periode sebelumnya. Pertamina mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat sebelum melakukan penyesuaian harga.

"Adapun untuk BBM nonsubsidi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat maka sampai saat ini masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya," ujar Kitty dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).

Berdasarkan harga yang berlaku per 2 September 2026, harga Pertamina Turbo untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen (termasuk DKI Jakarta dan sekitarnya) dibanderol Rp19.600 per liter, naik dari sebelumnya Rp18.300. Lalu, Pertamina Green 95 dijual Rp19.150 per liter dari sebelumnya Rp16.600.

Selanjutnya, harga Dexlite meningkat jadi Rp23.700 per liter dari sebelumnya Rp19.700, dan Pertamina Dex melesat jadi Rp25.200 per liter dari sebelumnya Rp21.150.

Sementara itu harga Pertamina tetap dibanderol 15.950 per liter, serta harga BBM subsidi jenis Peralite tetap Rp10.000 per liter dan Bio Solar di angka Rp6.800 per liter.

Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini
Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung
Peralite: Rp10.000 per liter

Biosolar: Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp16.300 per liter
Pertamax Turbo: Rp20.000 per liter

Dexlite: Rp24.200 per liter
Pertamina Dex: Rp25.750 per liter

Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau

Peralite: Rp10.000 per liter
Biosolar: Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp16.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp20.450 per liter

Dexlite: Rp24.750 per liter
Pertamina Dex: Rp26.300 per liter

FTZ Sabang
Peralite: Rp10.000 per liter
Biosolar: Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp14.950 per liter
Dexlite: Rp22.150 per liter
FTZ Batam
Peralite: Rp10.000 per liter
Biosolar: Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp15.150 per liter
Pertamax Turbo: Rp18.550 per liter

Dexlite: Rp22.500 per liter
Pertamina Dex: Rp23.950 per liter

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur

Peralite: Rp10.000 per liter
Biosolar: Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp15.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp19.600 per liter

Pertamax Green 95: Rp19.150 per liter

Dexlite: Rp23.700 per liter
Pertamina Dex: Rp25.200 per liter

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Peralite: Rp10.000 per liter
Biosolar: Rp6.800 per liter

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Karhutla Tak Padam, Penyakit Bertandang, Kesehatan Terabaikan

Oleh Rut sw · 28 Okt, 09.20 WIB



Ilustrasi Ketika paru-paru bumi berubah menjadi kepulan asap, kehidupan manusia ikut terancam. Ilustrasi ini menggambarkan kontras antara paru-paru hijau yang melambangkan udara bersih dan paru-paru hitam yang merepresentasikan polusi udara. Sebuah pengingat bahwa menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi pencemaran udara merupakan langkah penting untuk melindungi

ATA Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, menunjukkan terdapat 311.363 kasus, balita (bayi di bawah 5 tahun) mendominasi di angka 70.239 (22,6 persen) kasus. 65 kabupaten kota di 7 provinsi terdampak, yaitu: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah terserang ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Pengerahan 2.106 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) oleh Kemenkes telah mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak karhutla.

Mirisnya, dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki nebulizer, 1.070 puskesmas memiliki tabung oksigen dan 1.502 puskes-

mas memiliki oksigen concentra-

tor. Padahal alat itu menjadi penunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan.

Viral di media, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terekam mencoba alat bantu oksigen saat meninjau Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Publik mengatakan baru sehari di area terdampak sudah mengenakan alat bantu oksigen, bagaimana dengan warga yang sudah berbulan-bulan?

Lebih memalukan, ternyata Menkes dalam rangka meresmikan fasilitas Rumah Oksigen milik Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) serta Bus Oksigen Keliling milik Pemprov Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Sekaligus dalam rangka menyulurkan bantuan alat kesehatan seperti masker, tabung oksigen, nebulizer, hingga air purifier untuk membantu masyarakat terdampak.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5 dan zat berbahaya lainnya yang tak hanya memicu ISPA, batuk, sesak napas, tapi juga memperburuk asma.

Bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit paru kronis termasuk kelompok rentan.

Studi UC Irvine yang dipublikasikan dalam Environmental Protection Agency menganalisis lebih dari 627.000 kelahiran di California menjelaskan paparan PM2.5 dari asap karhutla yang berlebihan

selama kehamilan juga perlu diwaspadai, karena berkaitan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur (preterm birth) dan pecah ketuban dini sebelum persalinan (Preterm Premature Rupture of Membranes/PPROM).

Bahkan, jangka panjangnya dapat memengaruhi kesehatan otak dan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia.

Bencana Karhutla Membawa Bencana Yang Lebih Besar Lagi

Penanganan negara terhadap bencana karhutla kini jelas membawa bencana yang lebih besar lagi, yaitu masa depan generasi. Hari ini terbukti, mereka yang paling terdampak adalah anak, mereka menjadi korban kelalaian negara dalam menangani karhutla.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	